

**PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
DI MADRASAH TSANAWIYAH SATU ATAP (SA)
MIFTAHUL ULUM PANTI JEMBER
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam



Oleh:

Yayuk Lestari
NIM. 084143110

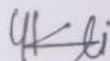
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
MEI 2020**

**PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
DI MADRASAH TSANAWIYAH SATU ATAP (SA)
MIFTAHUL ULUM PANTI JEMBER
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh:



Yavuk Lestari

NIM. 084143110

Disetujui Pembimbing



Prof. Dr. H. Abd. Muis Tabrani, MM.

NIP. 195504051986031003

**PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
DI MADRASAH TSANAWIYAH SATU ATAP (SA)
MIFTAHUL ULUM PANTI JEMBER
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

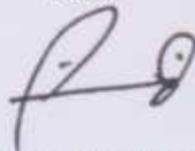
SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 15 April 2020

Tim Penguji:

Ketua



Nuruddin, M.Pd.I

NIP. 197903042007101002

Sekretaris

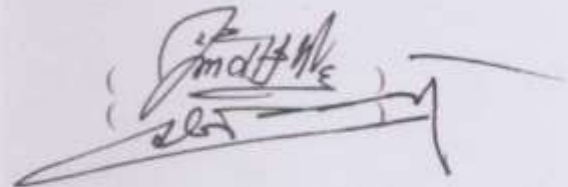


Ahmad Rovani, M.Pd.I

NUP. 20160386

Anggota :

1. Dr. Hj. St. Rodliyah, M.Pd
2. Prof. Dr. H. Abd. Muis Tabrani, MM.



Menyetujui

Plh. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Dr. H. Mashudi, M.Pd.

NIP. 197209182005011003

MOTTO

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ « :الْحَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفَقُ مَا أُمِرَ بِهِ ، فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مَوْفَرًا ، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ » متفقٌ عليه .

Artinya: Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi shalallahu alaihi wasalam bahwasanya beliau shalallahu alaihi wasalam bersabda: “Juru simpan yang Muslim dan dapat dipercaya yang dapat melangsungkan apa yang diperintahkan padanya, kemudian memberikan harta yang disimpannya dengan lengkap dan cukup, juga memberikannya itu dengan hati yang baik -tidak kesal atau iri hati pada orang yang diberi-, selanjutnya menyampaikan harta itu kepada apa yang diperintah padanya, maka dicatatlah ia -juru simpan tersebut- sebagai salah seorang dari dua orang yang bersedekah -juru simpan dan pemiliknya-.” (Muttafaq ‘alaih)¹



¹ Terjemah Riyadhus Shalihin, *Tolong Menolong dan Ketaqwaan*, bab 21

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas segala rahmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan, karya ini kupersembahkan kepada:

1. Alm. Ayah (Karno) dan Ibu (Misnaya) tercinta, yang selalu ikhlas memanjatkan do'a tiada henti, yang telah membesarkan, mendidik dengan kasih sayang tanpa lelah sedikitpun.
2. Kedua Kakak (Agus & Ade) dan seseorang yang saya sayangi, kebersamaan kalian telah memberi motivasi dan canda kalian yang bisa menghilangkan jenuh.
3. Herman Hakiki yang senantiasa menemani dan memberikan semangat.
4. Kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga kita selalu berada dalam ridho Allah SWT. Amiin.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Ungkapan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang senantiasa penulis panjatkan, karena hanya dengan ridho, rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Namun berkat usaha penulis dan dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE. MM., selaku Rektor IAIN Jember yang selalu memberikan fasilitas yang telah memberikan bimbingan dan layanan yang memuaskan selama penulis belajar.
2. Ibu Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Jember yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian.
3. Bapak Nuruddin, M.Pd.I, selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Jember yang meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi yang telah diselesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Muis Tabrani, MM., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak membimbing dengan sabar dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Segenap dosen pengajar di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama proses perkuliahan.
6. Bapak Wahyu Aji Sasmito, selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah SA Miftahul Ulum Panti Jember, yang telah member izin dan memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian dan menjadi narasumber penulis hingga selesai.
7. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi ini tentunya masih belum sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat konstruktif dan membangun penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca sekalian. Amiin.

Jember, 04 Mei 2020

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Yayuk Lestari, 2020: "Peran Serta Masyarakat Dalam Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap (SA) Miftahul Ulum Panti Jember Tahun Pelajaran 2018/2019"

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu instrumental input yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan pendidikan yang lemah akan menjadi penghambat bagi peningkatan kualitas pendidikan sehingga perlu dilakukan upaya penguatan pembiayaan pendidikan. Peran serta masyarakat dinilai tepat bagi penguatan pembiayaan pendidikan sebagai bentuk demokrasi berkeadilan yang bermakna bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkewajiban dalam penyediaan dana. Lembaga pendidikan harusnya memiliki kemampuan untuk melibatkan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. MTs SA Miftahul Ulum sebagai lembaga pendidikan Islam dalam pembiayaan pendidikannya mampu melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, baik berupa dana maupun daya, pikiran, tenaga atau sumbangan lainnya.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana peran serta masyarakat dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di MTs SA Miftahul Ulum?; 2) Bagaimana peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTs SA Miftahul Ulum?; 3) Bagaimana peran serta masyarakat dalam evaluasi pembiayaan pendidikan di MTs SA Miftahul Ulum?. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di MTs SA Miftahul Ulum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan, menuturkan dan menafsirkan data yang ada dan menghasilkan data deskriptif yang berupa data tertulis atau lisan dari informan dan data tersebut bersifat pernyataan. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan kondensasi data, penyajian data dan kesimpulan. Dan keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi tehnik.

Adapun hasil dari penelitian ini: 1) Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembiayaan pendidikan yaitu masyarakat ikut serta dalam penyusunan anggaran kegiatan madrasah dan kebutuhan pengembangan madrasah baik jangka pendek atau panjang, rancangan yang disusun berupa penerimaan dan pengeluaran yang akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan madrasah; 2) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembiayaan mengajukan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Infaq dari masyarakat setiap bulan Rp. 15.000 serta bantuan berupa tenaga dan barang; 3) Peran serta masyarakat dalam evaluasi pembiayaan pendidikan yaitu masyarakat ikut serta melihat ekspektasi biaya masuk dan rasio pengeluarannya berupa LPJ. Hal ini dilakukan agar menambah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	12
E. Definisi Istilah.....	13

F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Subyek Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data	49
F. Keabsahan Data.....	52
G. Tahap-tahap Penelitian.....	53
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	
A. Gambaran Obyek Penelitian	56
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	63
C. Pembahasan Temuan.....	78
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

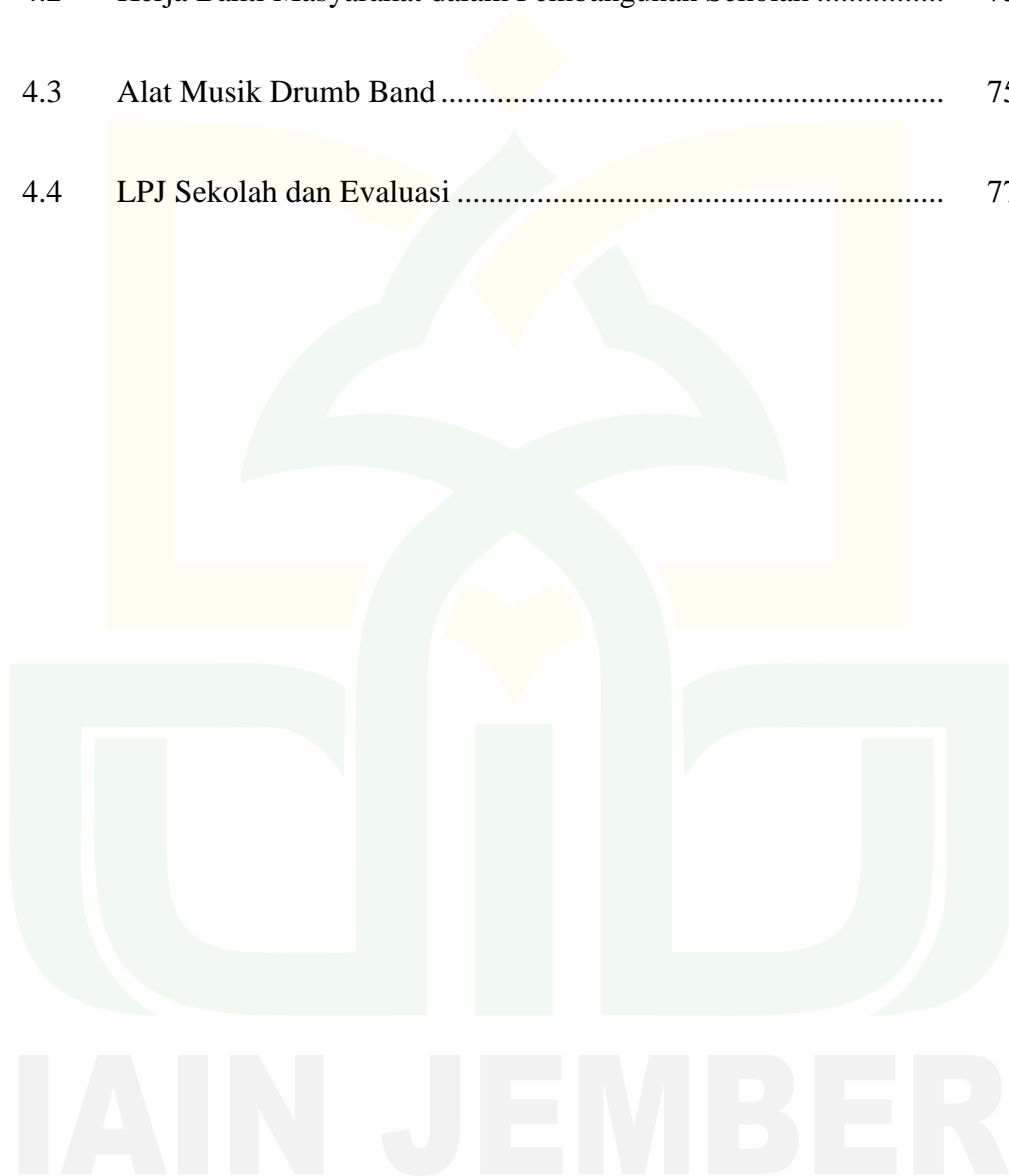
DAFTAR TABEL

2.1	Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	20
2.2	Tahapan Partisipasi Cohen dan Uphoff.....	26
2.3	Tangga Peran serta masyarakat	28
2.4	Tingkatan Partisipasi	29
2.5	Keterlibatan Orang Tua dalam Lembaga Pendidikan	31
4.1	Identitas Sekolah Madrasah Tsanawiyah SA Miftahul Ulum.....	57
4.2	Struktur Lembaga Madrasah Tsanawiyah SA Miftahul Ulum	59
4.3	Data Tenaga Pengajar Madrasah Tsanawiyah SA Miftahul Ulum.....	60
4.4	Data Siswa Madrasah Tsanawiyah SA Miftahul Ulum	61
4.5	Data Prasarana Madrasah Madrasah Tsanawiyah SA Miftahul Ulum	62

IAIN JEMBER

DAFTAR GAMBAR

4.1	Musyawaharah dengan Masyarakat	65
4.2	Kerja Bakti Masyarakat dalam Pembangunan Sekolah	73
4.3	Alat Musik Drumb Band	75
4.4	LPJ Sekolah dan Evaluasi	77



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 2: Matrik Penelitian

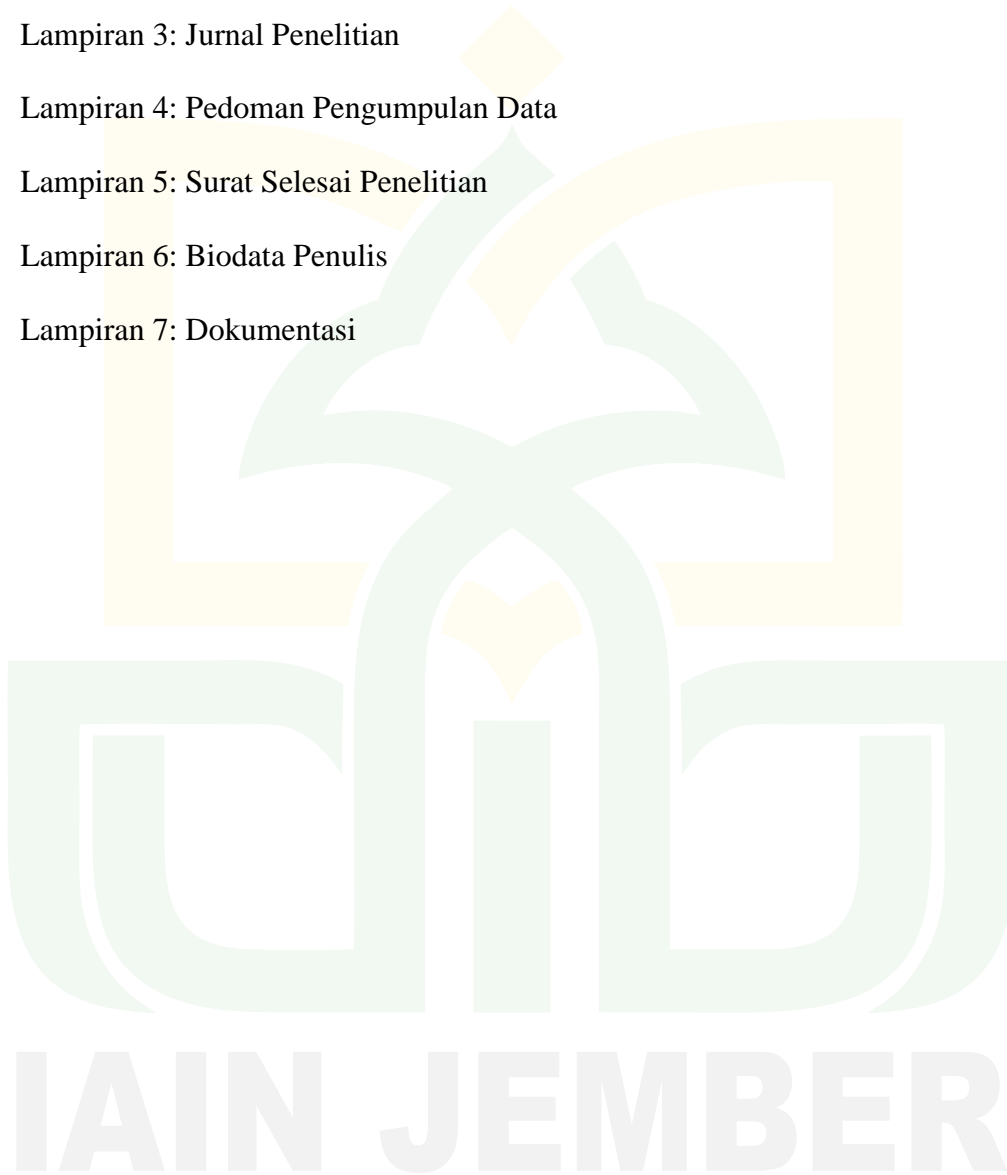
Lampiran 3: Jurnal Penelitian

Lampiran 4: Pedoman Pengumpulan Data

Lampiran 5: Surat Selesai Penelitian

Lampiran 6: Biodata Penulis

Lampiran 7: Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu upaya mewujudkan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk tercapainya pendidikan yang berkualitas, diperlukan adanya dukungan dan peran serta dari semua pihak terutama yang menyangkut masalah pembiayaan pendidikan.

Peran serta masyarakat penting dalam memberikan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan, meningkatkan tanggung jawab melalui komite dan dewan pendidikan, selain itu peran masyarakat penting dalam penyelenggaraan pendidikan dan menciptakan suasana serta kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.¹

Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu

¹ Siti Roskina Mas, *Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Malang), 11.

pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.²

Pembiayaan pendidikan penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas memerlukan adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumberdaya yang ada dalam suatu lembaga pendidikan.³ Pembiayaan pendidikan merupakan bagian yang penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini disebabkan karena segala kegiatan pendidikan tentu memerlukan dana atau biaya. Biaya pendidikan bukanlah sesuatu yang baru, akan tetapi merupakan hal yang menarik untuk diperbincangkan, terutama pada saat tahun ajaran baru.

Hal ini juga diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang Standar biaya operasi nonpersonalia untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.⁴

² Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, (Jakarta, 2006), 35.

³ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Surabaya: eIKAF, 2006), 98.

⁴ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan Nonpersonalia, (Jakarta: Depdiknas), 2.

Selain peraturan di atas pendanaan pendidikan juga dijelaskan pada peraturan pemerintah mengenai siapa saja yang bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan pada pasal 2 yaitu:

1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
2. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, dan pihak lain selain yang dimaksud yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.⁵

Ulpha Lisni Azhari Dedy Achmad Kurniady dalam hasil penelitian jurnalnya menunjukkan bahwa pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah secara bersama-sama memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan. Berdasarkan temuan tersebut maka direkomendasikan untuk sekolah agar memperhatikan tahapan manajemen pembiayaan pendidikan terutama pada saat perencanaan dan pengawasan pembiayaan.⁶

Mengingat pentingnya peran pembiayaan dalam proses pembelajaran, maka tidak dapat dihindari adanya tata kelola pembiayaan yang baik dalam penganggaran pendidikan. Terkait dengan pembiayaan pendidikan, banyak masalah yang muncul yaitu minimnya anggaran pendidikan, penyimpangan dalam penyaluran dana pendidikan, dan alokasi dana yang belum memadai.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, 1.

⁶ Ulpha Lisni Azhari & Dedy Achmad Kurniady, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, dan Mutu Sekolah", *Jurnal Administrasi Pendidikan* Vol.XXIII No.2 Tahun 2016.

Tiga kebutuhan dasar dalam pembangunan masyarakat, salah satu diantaranya adalah peran serta dalam membuat dan melaksanakan program, selain kebutuhan dasar lainnya seperti pangan, sandang dan papan, pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Karenanya, lembaga pendidikan harus terus berupaya memelihara dan meningkatkan peran serta masyarakat dengan menerapkan konsep manajemen yang baik dengan tawaran-tawaran program yang mampu menarik simpati masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan tentu saja program yang dibangun harus mampu menjawab tuntutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara signifikan,⁷ sehingga kolaborasi antara masyarakat dengan lembaga pendidikan dikembangkan secara sinergis. Hal ini mengingat adanya kepentingan dan cita-cita yang sama yakni meyelamatkan dan mencerahkan masa depan generasi bangsa.

Sumber pembiayaan pendidikan merupakan semua pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima oleh lembaga sekolah, baik dari lembaga sumber resmi ataupun dari masyarakat sendiri secara teratur.⁸ Definisi sumber pembiayaan pendidikan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan dan kualitas pendidikan yang didukung dengan adanya pembiayaan pendidikan yang kuat tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah atau lembaga pendidikan semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab lingkungan, yakni keluarga (wali siswa) dan masyarakat. Karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara

⁷ Yahya Mof, Dkk, "Manajemen Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan di Mts Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin", *Jurnal Tashwir Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Iain Antasari* 1, No.2, Juli-Desember (2013), 62.

⁸ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2006), 113.

pemerintah, keluarga (orang tua/wali siswa), dan masyarakat. Hal tersebut menegaskan pula bahwa orang tua atau wali siswa dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi dan memikul bersama kebutuhan-kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan, terlebih dalam hal pembiayaan pendidikan.

Keterlibatan orang tua dalam pembiayaan pendidikan memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi peningkatan kualitas sekolah atau lembaga pendidikan.⁹ Otonomi sekolah dalam pembiayaan mampu memberikan kekuatan bagi sekolah untuk menarik dana-dana yang berasal dari luar karena sekolah yang dinilai mempunyai kemampuan swadana bagi pengembangan program-program unggulan sehingga pihak luar pun atau pemerintah memberikan kepercayaan kepada sekolah.

Dari penjelasan tersebut, apabila ditelaah lebih lanjut dapat dipahami bahwa keterlibatan orang tua atau wali siswa MTs SA Miftahul Ulum Jember dalam pembiayaan pendidikan memberikan kontribusi positif bagi lembaga pendidikan untuk memenuhi kelengkapan dan kebutuhan dalam penyelenggaraannya. Semakin besar dana yang dikeluarkan oleh orang tua atau wali setidaknya menunjukkan semakin besar pula partisipasinya dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam surah Al Mujadilah: 12-13:

⁹ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 250.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقَةً ۚ
 ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ ءَأَشْفَقْتُمْ أَن
 تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقَتٍ ۚ فَإِذْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin), sebelum pembicaraan itu. yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih: jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah Ta’ala memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah shalat, tunaikan zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Mujadilah: 12-13)¹⁰

Dengan demikian, peran serta masyarakat secara aktif dalam pembiayaan pendidikan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi merupakan hal yang dibutuhkan untuk diwujudkan dimana hal tersebut memiliki posisi dan peran strategis sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Pembiayaan merupakan salah satu komponen yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran bersama komponen yang lain.¹¹ Komponen-komponen pembiayaan pendidikan terutama di madrasah, selayaknya dikelola secara efektif. Pembiayaan pendidikan yang ada di madrasah diatur, direncanakan, dan dipergunakan

¹⁰ QS. Al-Mujadilah 58: 12-13.

¹¹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rusada Karya, 2004), 47.

secara baik dan tepat sasaran dan kebutuhan. Kenyataan yang ada, sebagian besar lembaga pendidikan Madrasah Swasta saat ini masih menerapkan pola-pola manajemen yang sangat sederhana dalam mengelola dana yang bersumber dari masyarakat/orang tua. Salah satu diantara Madrasah Swasta yang masih menerapkan pola-pola manajemen sederhana dalam mengelola dana yang bersumber dari masyarakat/orang tua adalah MTs Miftahul Ulum Panti Jember.

Berdasarkan observasi awal oleh peneliti berkenaan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat, diketahui pengelolaan dana tersebut belum dimanajemen secara maksimal dari proses pembuatan perencanaan penggunaannya, realisasi pelaksanaannya oleh pihak terkait dan evaluasi.¹²

Upaya konkret untuk mendongkrak mutu pelayanan pendidikan di MTs Sa Mifahul Ulum adalah dengan penguatan peran serta masyarakat, yakni dengan mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Peran serta masyarakat dinilai penting karena merupakan salah satu realisasi dari esensi demokrasi berkeadilan.¹³ Hal tersebut bermakna bahwa selain masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, juga melekat kewajiban pada mereka untuk ikut serta dalam pengadaan dan pengelolaan pendidikan, baik dalam hal penyediaan dana,

¹² Observasi awal peneliti terhadap peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan pada tanggal 03 Januari 2019.

¹³ Dasim Budimansyah, *Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat*, (Jurnal Educationist 2, no.1 : 2008), 57.

pengembangan, dan pemeliharaan sarana serta prasarana pendidikan maupun kepakaran atau keahlian yang diperlukan dalam penyusunan program serta implementasinya.

Berdasarkan studi pendahuluan melalui wawancara dengan bapak Wahyu Aji Sasmito selaku Kepala Sekolah menuturkan bahwa kemampuan untuk mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat merupakan hal penting, karena dengan kepercayaan masyarakatnya yang tinggi akan berdampak positif bagi peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembiayaan pendidikan yang muaranya pada pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga tersebut.¹⁴

Begitu juga masyarakat yang berada di daerah MTs SA Miftahul Ulum yang tinggal di Desa Kemiri Kecamatan Panti yang sadar akan pentingnya peran dalam dunia pendidikan. Meskipun MTs SA Miftahul Ulum yang masih berstatus akreditasi c ini berada di lingkungan pedesaan yang lumayan jauh dari perkotaan, serta sebagian besar penduduknya mempunyai tingkat perekonomian menengah ke bawah dan jarang sekali berpendidikan tinggi sampai ke tingkat perguruan tinggi, namun kesadaran masyarakat cukup baik terhadap perannya untuk sekolah sehingga muncul keinginan untuk ikut serta dalam memajukan pendidikan dengan memberi dukungan serta membantu semampunya kepada lembaga pendidikan yang sudah ada di desanya yaitu MTs SA Miftahul Ulum. Masyarakat di desa ini tidak hanya memanfaatkan fasilitas sekolah dengan cara menyekolahkan anak-anaknya saja, tetapi juga

¹⁴ Wahyu Aji Sasmito, *wawancara*, 03 Januari 2019.

berperan dalam hal memberikan tenaga untuk perawatan serta pembangunan fisik sekolah, keikutsertaan masyarakat dalam membantu sekolah ketika ada kegiatan.

Dengan kenyataan inilah peneliti memiliki pemikiran untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di MTs SA Miftahul ulum.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah SA Miftahul Ulum Panti Jember?
2. Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah SA Miftahul Ulum Panti Jember?
3. Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam evaluasi pembiayaan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah SA Miftahul Ulum Panti Jember?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini secara umum ialah untuk menemukan pola peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah SA Miftahul Ulum Panti Jember. Adapun secara rinci, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah SA Miftahul Ulum Panti Jember.
2. Mendeskripsikan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah SA Miftahul Ulum Panti Jember.

3. Mendeskripsikan peran serta masyarakat dalam evaluasi pembiayaan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah SA Miftahul Ulum Panti Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca.

Adapun manfaat yang diharapkan adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan Manajemen Pendidikan Islam dan dapat menjadi rujukan bagi para pengelola lembaga pendidikan Islam.
- b. Dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang melakukan kajian dengan tema terkait.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dapat memperluas wawasan sekaligus pengetahuan empirik dan praktis tentang bagaimana penerapan keilmuan Manajemen Pendidikan Islam yang didapatkan selama menjalani studi di IAIN Jember.

- b. Bagi Lembaga yang diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan literatur dari segenap karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai referensi kajian terdahulu bagi penelitian-penelitian yang akan dimasa yang akan datang tentang pembiayaan pendidikan. Sekaligus dapat

dijadikan kajian untuk melengkapi kepustakaan dan tambahan referensi kepustakaan bagi lembaga yang diteliti.

c. Bagi Pembaca/Masyarakat

Penelitian ini semoga dapat diterima sebagai kontribusi dalam pengembangan pendidikan Islam, khususnya sebagai alternatif rujukan bagi para manajer untuk mendapatkan solusi alternatif bagi penguatan pembiayaan pendidikan dengan melibatkan peran serta masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Selain itu, semoga penelitian ini dapat menjadi referensi praktis khususnya bagi para personil Madrasah Tsanawiyah untuk memperoleh alternatif solusi bagi peningkatan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs).

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁵ Dari judul **“Peran Serta Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap (SA) Miftahul Ulum Panti Jember”** maka hal-hal perlu dijelaskan sebagai berikut:

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Press, 2019), 45.

1. Masyarakat

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang berifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.¹⁶

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu populasi kehidupan manusia yang saling berinteraksi satu sama lain dalam menjalankan hidup setiap harinya berdasarkan atas adat istiadat, norma dan perilaku individu.

2. Peran Serta Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁷, peran serta dimaknai sebagai partisipasi atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Masyarakat (community) menunjuk pada warga sebuah desa, kota, atau suku. Apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa, sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tadi disebut masyarakat. Khususnya masyarakat sekitar MTs SA Miftahul Ulum Panti Jember.

Peran serta yang di maksud dalam penelitian ini adalah keikutsertaan atau partisipasi suatu masyarakat dalam mengembangkan lembaga pendidikan.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 118.

¹⁷ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

3. Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan merupakan potensi yang menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian pendidikan. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah/madrasah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak. Pembiayaan perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk tercapainya tujuan pendidikan.

Jadi judul penelitian peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di MTs SA Miftahul Ulum Kecamatan Panti Kabupaten Jember adalah penelitian yang mengkaji tentang Madrasah Tsanawiyah dalam menjalin kerjasama dengan masyarakatnya yaitu Masyarakat Desa Kemiri baik kerjasama di bidang akademik maupun finansial yang dapat meningkatkan peran serta masyarakatnya dalam pembiayaan pendidikan di Madrasah tersebut. Dengan adanya peran serta masyarakat yang baik dalam pembiayaan pendidikan, hal tersebut akan membantu dan mendukung dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di MTs SA Miftahul Ulum.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam pedoman karya ilmiah berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif bukan seperti daftar isi.¹⁸

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan...*, 48.

Penelitian ini akan dicetak dalam bentuk skripsi yang membahas beberapa pokok bahasan yang terdiri dari lima bab dan setiap bab memiliki beberapa sub bab, antara bab satu dan yang lainnya saling berhubungan bahkan merupakan pendalaman pemahaman dari bab sebelumnya. Untuk lebih mudah dibawah ini akan dikemukakan gambar umum secara singkat dari pembahasan skripsi ini.

Bab satu memuat komponen dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, kemudian fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang penelitian terdahulu yang memuat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini dan kajian teori yang digunakan sebagai perspektif oleh peneliti, yaitu tentang peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di MTs SA Miftahul Ulum Panti Jember Tahun Pelajaran 2018/2019.

Bab tiga membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan yang terakhir adalah tahap-tahap penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Metode penelitian merupakan acuan yang diikuti guna menjawab pertanyaan dalam fokus penelitian.

Bab empat membahas tentang penyajian data dan analisis yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis data, serta diakhiri dengan pembahasan temuan dari lapangan. Bab ini berfungsi sebagai bahan

kajian untuk memaparkan data yang diperoleh guna menemukan kesimpulan. Dengan kesimpulan ini akan dapat membantu memaknai penelitian yang telah dilakukan.

Bab lima berisi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan, dengan kesimpulan ini akan dapat membantu makna dari penelitian yang telah dilakukan.

Adapun bagian akhir dalam laporan penelitian ini ialah penutup yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran sebagai pendukung di dalam penemuan kelengkapan data skripsi.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Berangkat dari judul yang peneliti pilih, dalam hal ini terdapat beberapa penelitian terkait, diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Riski Ayu Pradita tahun 2017, yang berjudul “Manajemen Pembiayaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bondowoso II Tahun Pelajaran 2017/2018”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini: yaitu (1) Bagaimana proses penganggaran pembiayaan di MTsN Bondowoso II Tahun Pelajaran 2017/2018? (2) Bagaimana pembukuan pembiayaan di MTsN Bondowoso II Tahun Pelajaran 2017/2018? (3) Bagaimana pengawasan pembiayaan di MTsN Bondowoso II Tahun Pelajaran 2017/2018?.

Dalam hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses penganggaran pembiayaan melalui 4 tahap (menyusun program kerja, mengidentifikasi rincian dana, menentukan sumber dana, dan penetapan anggaran), pembukuan pembiayaan yang dilakukan oleh bendahara, dan pengawasan pembiayaan yang dilakukan secara berkala.

Persamaannya dalam penelitian sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih menekankan pembahasan pada proses penganggaran, pembukuan dan pengawasan pembiayaan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada pembahasan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

2. Skripsi yang disusun oleh Nanang Qosim tahun 2014, yang berjudul “Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun Pelajaran 2014/2015”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini: yaitu (1) Bagaimana perencanaan manajemen hubungan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di MAN Bondowoso Tahun Pelajaran 2014/2015? (2) Bagaimana pengorganisasian manajemen hubungan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di MAN Bondowoso Tahun Pelajaran 2014/2015? (3) Bagaimana pelaksanaan manajemen hubungan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di MAN Bondowoso Tahun Pelajaran 2014/2015? (4) Bagaimana pengawasan manajemen hubungan

masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di MAN Bondowoso Tahun Pelajaran 2014/2015?.

Dalam hasil penelitian menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di daerah MAN berjalan dengan baik, dilihat dari kegiatan sekolah dengan masyarakat yang selalu menjalin hubungan yang harmonis dalam berbagai kegiatan.

Persamaannya dalam penelitian sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut memfokuskan penelitian pada hubungan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang memfokuskan pada peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

3. Skripsi yang disusun oleh Iftitahus Sholeha tahun 2017, yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Berbasis Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Ma’arif NU Kencong Jember Tahun Pelajaran 2017/2018”.

Fokus penelitian dalam penelitian ini: yaitu (1) Bagaimana perencanaan manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah aliyah Ma’arif NU Kencong Jember Tahun Pelajaran 2017/2018? (2) Bagaimana pelaksanaan manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Ma’arif NU Kencong Jember Tahun Pelajaran 2017/2018? (3) Bagaimana evaluasi manajemen pembiayaan

berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Ma'arif NU Kencong Jember Tahun Pelajaran 2017/2018?.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan sudah berjalan, akan tetapi belum tercapai secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan jawaban yang diperoleh dari satu tata usaha dan dua orang guru melalui pertanyaan yang diajukan.

Persamaannya dalam penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut memfokuskan penelitian manajemen pembiayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang memfokuskan pada peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

Tabel 2.1
Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu
dengan penelitian yang akan dilakukan

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1.	Riski Ayu Pradita Mahasiswi IAIN Jember tahun 2017, dengan judul “Manajemen pembiayaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bondowoso II Tahun Pelajaran 2017/2018”	Proses penganggaran pembiayaan melalui 4 tahap (menyusun program kerja, mengidentifikasi rincian dana, menentukan sumber dana, dan penetapan anggaran), pembukuan pembiayaan yang dilakukan oleh bendahara, dan	- Menggunakan penelitian kualitatif - Mengkaji tentang manajemen pembiayaan	Manajemen pembiayaan di MTsN Bondowoso II tahun pelajaran 2017/2018 mengkaji tentang proses manajemennya atau pengelolaan lembaga sedangkan penelitian peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di MTs SA Miftahul Ulum panti lebih

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
		pengawasan pembiayaan yang dilakukan secara berkala.		terhadap peran atau partisipasi masyarakat dalam membantu pembiayaan Madrasah
2.	Nanang Qosim Mahasiswa IAIN Jember tahun 2014, dengan judul “Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun Pelajaran 2014/2015”	Partisipasi masyarakat di daerah MAN berjalan dengan baik, dilihat dari kegiatan sekolah dengan masyarakat yang selalu menjalin hubungan yang harmonis dalam berbagai kegiatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan penelitian kualitatif - Mengkaji tentang partisipasi masyarakat 	penelitian tersebut memfokuskan penelitian pada hubungan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang memfokuskan pada peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.
3.	Iftitahus Soleha Mahasiswi IAIN Jember tahun 2017, dengan judul “Manajemen Pembiayaan Berbasis Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Ma’arif NU Kencong Jember Tahun Pelajaran 2017/2018”	Pembiayaan pendidikan sudah berjalan, akan tetapi belum tercapai secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan jawaban yang diperoleh dari satu tata usaha dan dua orang guru melalui pertanyaan yang diajukan.	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan penelitian kualitatif - Mengkaji tentang pembiayaan 	Penelitian tersebut mengkaji Manajemen pembiayaan berbasis madrasah tanpa melibatkan masyarakat sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus dalam kajian peran serta masyarakat dalam membantu pembiayaan madrasah

B. Kajian Teori

1. Peran Serta Masyarakat

a. Pengertian Peran Serta Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,²⁰ partisipasi dimaknai sebagai perihal berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Menurut Dr. Made Pidarta, peran serta adalah melibatkan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan²¹. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Jadi peran serta masyarakat atau partisipasi warga adalah proses ketika warga sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta atau ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

b. Bentuk dan Tingkatan Peran serta Masyarakat

Peran serta atau partisipasi dapat di bagi dalam berbagai bentuk. Peran serta menurut Effendi²² terbagi atas peran serta vertikal dan peran serta horizontal. Disebut peran serta vertikal karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu

²⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

²¹ Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipasi dengan Pendekatan System*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 53.

²² Effendi, *Analisa Persepsi Masyarakat terhadap Taman Nasional Gunung Lauser Desa Harapan Jaya Kabupaten Langat Sumatra Utara* (Sumatera: UNSU, 2002).

program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan atau pengikut. Disebut peran serta horizontal, karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, dimana setiap anggota/kelompok masyarakat berperan serta horizontal satu dengan yang lain.

Peran serta semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. Asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang peran serta masyarakat ialah dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan suatu lembaga.

Basrowi sebagaimana yang dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu peran serta nonfisik dan peran serta fisik²³. Peran serta fisik adalah peran serta masyarakat dalam bentuk penyelenggaraan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah, menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku-buku atau bantuan lainnya. Adapun peran serta nonfisik adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk

²³ Siti Irene Astuti D, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 58-59.

menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Inti dari suatu partisipasi ialah mengenai “siapa” yang berpartisipasi dan dalam aktivitas “apa” mereka berpartisipasi. Cohen dan Uphoff sebagaimana yang dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum²⁴ membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu: *Pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan. *Ketiga*, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. *Keempat*, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan secara bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial. Berikut rincian keempat jenis partisipasi tersebut:

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan merupakan hal yang penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian peran serta masyarakat dalam

²⁴ Siti Irene Astuti D, *Desentralisasi...*, 61-62.

pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: *Pertama*, menggerakkan sumber daya dan dana. *Kedua*, kegiatan administrasi dan koordinasi. *Ketiga*, penjabaran program. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peran serta masyarakat dalam pelaksanaan suatu program merupakan satu unsur yang turut menentukan keberhasilan program itu sendiri.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program ditandai dengan adanya peningkatan *output*, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang ditetapkan atau tidak.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Peran serta masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program

secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan ataukah ada penyimpangan.

Secara singkat, berikut partisipasi menurut Cohen dan Uphoff sebagaimana yang dikutip Siti Irene Astuti Dwiningrum dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Tahapan Partisipasi Cohen dan Uphoff²⁵

No.	Tahap	Deskripsi
1	2	3
1.	Pengambilan keputusan	Penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.
2.	Pelaksanaan	Penggerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.
3.	Pengambilan Manfaat	Partisipasi berkaitan dari kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.
4.	Evaluasi	Berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program

Cohen dan Uphoff menambahkan bahwa ilmuwan dan politikus memberikan perhatian pada jenis partisipasi dalam pengambilan keputusan dan partisipasi dalam evaluasi. Sementara para administrator cenderung memberikan perhatian pada jenis partisipasi dalam pengambilan manfaat terutama dalam rangka memperbaiki *well being*

²⁵ Siti Irene Astuti D, *Desentralisasi...*, 63.

masyarakat. Hal tersebut memperhatikan adanya latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda yang akan menimbulkan konsep partisipasi yang berbeda pula.

Praktik partisipasi sebagai hak politik memerlukan keterlibatan langsung dari warga dalam pembuatan kebijakan publik sehingga terjalin sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kepercayaan publik yang menjadi modal penting dalam pemerintahan yang desentralistik. Peran serta masyarakat juga berarti adanya keterlibatan langsung bagi warga dalam proses pengambilan keputusan dan kontrol serta koordinasi dalam mempertahankan hak-hak sosialnya.

Adapun dalam konteks kepemilikan, pendidikan berbasis masyarakat dianggap sebagai berbasis masyarakat jika segala hal yang terkait di dalamnya berada di tangan masyarakat, seperti perencanaan hingga pelaksanaan. Sebaliknya, jika semua penyelenggaraan pendidikan ditentukan pemerintah maka disebut pendidikan berbasis pemerintah atau negara (*state-based education*).²⁶

Jika dikaitkan dengan tingkat kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat, peran serta masyarakat oleh Shery Arstein dalam Suhirman sebagaimana dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum dapat dibedakan ke dalam anak tangga sebagai berikut:

²⁶ Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 134.

Tabel 2.3
Tangga Peran Serta Masyarakat²⁷

No.	Klasifikasi	Uraian	Tingkatan
1	2	3	4
1.	<i>Citizen Power</i>	Pada tahap ini sudah terjadi pembagian hak, tanggung jawab dan wewenang antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengambilan keputusan.	Kontrol masyarakat (<i>citizen control</i>), pelimpahan kekuasaan (<i>delegated control</i>), kemitraan (<i>partnership</i>).
2.	<i>Tokenism</i>	Hanya sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakat mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara, tetapi pendapat mereka belum menjadi bahan dalam pengambilan keputusan.	Penetraran (<i>placation</i>), konsultasi (<i>conculation</i>), informasi (<i>information</i>).
3.	<i>Non Participation</i>	Masyarakat hanya dijadikan obyek.	Terapi (<i>therapy</i>), manipulasi (<i>manipulation</i>).

Dari tangga partisipasi tersebut dapat diasumsikan bahwa partisipasi yang mampu menggerakkan dinamika masyarakat adalah partisipasi yang diklasifikasikan ke dalam *citizen power*, karena dalam konteks inilah terdapat keterlibatan *civil society* sebagai pilar penting dalam menggerakkan masyarakat.

Secara khusus, Peter Oklay dalam Tadjudin Noer Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum mencoba memetakan partisipasi dalam tujuh tingkatan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

²⁷ Siti Irene Astuti D, *Desentralisasi...*, 64.

Tabel 2.4
Tingkatan Partisipasi²⁸

No.	Tingkatan	Deskripsi
1	2	3
1.	<i>Manipulation</i>	Tingkat paling rendah mendekati situasi tidak ada partisipasi, cenderung berbentuk indoktrinasi.
2.	<i>Consultation</i>	<i>Stakeholder</i> mempunyai peluang untuk memberikan saran akan digunakan seperti yang mereka harapkan.
3.	<i>Consensus-building</i>	Pada tingkat ini <i>stakeholder</i> berinteraksi untuk saling memahami dan dalam posisi saling bernegosiasi, toleransi dengan seluruh anggota kelompok. Kelemahan yang sering terjadi adalah individu-individu dan kelompok masih cenderung diam atau setuju bersifat pasif.
4.	<i>Decision-making</i>	Konsensus terjadi didasarkan pada keputusan kolektif dan bersumber pada rasa tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu. Negosiasi pada tahap ini mencerminkan derajat perbedaan yang terjadi dalam individu maupun kelompok.
5.	<i>Risk-taking</i>	Proses yang berlangsung dan berkembang tidak hanya sekedar menghasilkan keputusan, tetapi memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut keuntungan, hambatan, dan implikasi. Pada tahap ini semua orang memikirkan risiko yang muncul dari hasil keputusan. Karenanya, akuntabilitas merupakan basis penting.
6.	<i>Partnership</i>	Memerlukan kerja secara equal menuju hasil yang mutual. Equal tidak hanya sekedar dalam bentuk struktur dan fungsi tetapi juga dalam tanggung jawab.
7.	<i>Self-management</i>	Puncak dari peran serta masyarakat. <i>Stakeholder</i> berpartisipasi dalam proses saling belajar (<i>learning process</i>) untuk mengoptimalkan hasil dan hal-hal yang menjadi perhatian.

²⁸ Siti Irene Astuti D, *Desentralisasi....*, 65-66.

Interaksi yang terjalin antara orang tua dan sekolah meliputi dua kategori, yaitu *parental involvement* dan *parental participation*. Indikasi *parental participation* ialah orang tua berpengaruh atau berupaya mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pada hal-hal yang penting di sekolah, seperti penentuan program sekolah, masalah keuangan, dan lain-lain. Sebaliknya, indikasi *parental involvement* mengarah pada keterlibatan orang tua pada semua jenis aktivitas yang ditujukan untuk mendukung program-program sekolah. Dari beberapa pertimbangan yang menekankan pada kebutuhan psikologis anak, maka *parental involvement* merupakan solusi yang mungkin lebih tepat untuk dilakukan di sekolah-sekolah.

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Azyumardi Azra²⁹ bahwa keikutsertaan masyarakat termasuk wali siswa dalam mendukung program sekolah termasuk pada struktur manajemen pendidikan bertujuan untuk memberikan ruang bagi terciptanya lembaga pendidikan yang akuntabel, efektif dan berkualitas. Pendidikan yang berakar pada masyarakat berarti adanya partisipasi dan kontrol masyarakat sebagai pemilik dan pengguna jasa layanan pendidikan.

Tingkat keterlibatan orang tua di sekolah tidak hanya ditentukan oleh orang tua, tetapi juga ditentukan oleh sistem pendidikan yang berlaku. Humas sebagaimana dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum

²⁹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Melenium II*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 153.

menyebutkan bahwa proses keterlibatan orang tua di sekolah/ lembaga pendidikan yang disusun secara hirarkhis dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Keterlibatan Orang Tua dalam Lembaga Pendidikan³⁰

No.	Level	Deskripsi
1	2	3
1.	<i>Spectator</i>	Menunjukkan keterlibatan orang tua di sekolah sangat kecil, bisa dikatakan tidak ada. Orang tua merasakan bahwa sekolah dan guru merupakan sebuah kekuasaan yang otonom sehingga tidak menginginkan campur tangan orang tua. Pintu sekolah dipandang orang tua sebagai penghalang untuk berpartisipasi. Aktivitas yang menuntut partisipasi orang tua dilakukan di luar sekolah. Peran orang tua sangat terbatas. Komunikasi antara guru dan orang tua, baik melalui surat atau telepon sangat jarang terjadi. Bentuk komunikasi terjadi hanya bila orang tua mempunyai keluhan atau penolakan terhadap informasi yang diterima mengenai anaknya. Bahkan lebih buruk dari itu, orang tua memperlihatkan reaksi yang berlebihan terhadap prestasi buruk yang dicapai anak dengan mengkritik sekolah secara terbuka, menghukum anak atau bahkan melukai secara fisik.
2.	<i>Support</i>	Menunjukkan keterlibatan orang tua di sekolah hanya pada saat khusus di mana pihak sekolah meminta keterlibatan mereka. Tugas yang dibebankan kepada orang tua biasanya dapat diselesaikan di rumah dan tidak menuntut waktu dan energi. Sebagai contohnya, orang tua ke sekolah untuk memastikan bahwa anaknya hadir, orang tua memeriksa pekerjaan rumah anak. Selain itu, orang tua biasanya menyumbang bagi sekolah, membayar iuran kelompok orang tua dan sebagainya.

³⁰ Siti Irene Astuti D, *Desentralisas...*, 74-75.

3.	<i>Engagement</i>	Hubungan orang tua dan sekolah saling menghormati dalam suasana yang saling mendukung. Keterlibatan orang tua di sekolah berdasarkan dua kebutuhan umum, yaitu: a. mengamati sekolah dan pengaruhnya terhadap anak, b. agar partisipasinya disaksikan oleh anak. Adapun pihak sekolah mengharapkan orang tua dapat: a. mengembangkan dan mendistribusikan sumber informasi untuk sekolah dan masyarakat, b. bekerja sebagai <i>volunteer</i> dan atau sebagai narasumber untuk membagi pengetahuan, keterampilan dan bakat khusus kepada siswa. Guru dapat meminta orang tua untuk menyediakan sarana transportasi dan menemani siswa pada kunjungan studi lapangan. Bahkan di kelas, orang tua dapat membimbing siswa dan membawa siswa pada kegiatan akademis di bawah pengasuhan guru. Keterlibatan orang tua sejalan dengan harapan untuk mengetahui pengalaman anak di sekolah serta pengalaman anak-anak lain, orang tua menyadari bahwa fungsi sekolah tidak hanya menyediakan keterampilan sebagai bekal kerja tetapi sekolah juga berfungsi memberi bekal agar siswa memiliki keterampilan hidup yang berkualitas.
4.	<i>Decision making</i>	Orang tua menuntut hubungan yang saling tergantung antara rumah dan sekolah. Pada tingkat ini, kekuatan sekolah diperoleh melalui jaringan yang dimiliki orang tua. Aktivitas orang tua pada tingkat ini adalah secara konsisten mempengaruhi pengambilan keputusan. Orang tua bertanggungjawab pada setiap aspek sekolah.

Dengan adanya kesadaran dan keikhlasan masyarakat dalam berpartisipasi pada suatu kegiatan, perasaan bahwa dengan partisipasi akan mengeluarkan materi, dengan partisipasi akan mengurangi waktu, dengan partisipasi harus belajar lagi, dan dengan partisipasi akan menambah pikiran, hal-hal tersebut tidak akan muncul dalam diri masyarakat. Dengan kesadaran dan rasa ikhlas masyarakat dalam

mendukung dan berpartisipasi dalam suatu program, hal yang akan muncul pada masyarakat ialah sikap profesional dan keterlibatan secara penuh dalam suatu program atau kegiatan. Untuk itu, masyarakat perlu dirangkul untuk mengetahui permasalahan yang ada di mana dari permasalahan tersebut masyarakat diajak untuk menganalisis tentang solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, masyarakat merasa bahwa dirinya ada dan dianggap serta merasa diperlukan bagi pemecahan solusi-solusi terkait permasalahan yang ada.

c. Faktor yang Mempengaruhi Peran Serta Masyarakat

Menurut Plumer beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:³¹

- 1) Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada.
- 2) Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.

³¹ Yulianti, *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan*, (Padang: Universitas Andalas, 2012), 10.

- 3) Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
- 4) Jenis kelamin. Sudah diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan
- 5) Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

2. Pembiayaan Pendidikan

Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif atau kualitatif biaya pendidikan memiliki peranan yang menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan sukar berjalan dengan lancar.

Timbulnya pembicaraan pembiayaan pendidikan antara lain seiring dengan terjadinya pergeseran dari kegiatan belajar mengajar yang semula dilakukan secara individual dan sambilan dalam situasi ilmu pengetahuan

yang belum berkembang, menjadi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara khusus dan profesional dalam situasi ilmu dan pengetahuan yang sudah mulai berkembang. Dalam situasi yang terakhir ini, proses belajar mengajar tidak dapat lagi dilakukan secara sambilan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada seperti masjid atau bagian tertentu dari rumah guru, melainkan sudah memerlukan tempat yang khusus, sarana prasarana, infrastruktur, guru, dan lainnya yang secara khusus diadakan untuk kegiatan belajar dan mengajar. Dalam situasi yang demikian itulah, maka pembiayaan pendidikan merupakan bagian yang harus diadakan secara khusus.³²

Biaya dalam ekonomi diartikan sebagai pengorbanan yang dinyatakan dalam bentuk uang, diberikan secara rasional, melekat pada proses produksi, dan tidak dapat dihindarkan serta dapat dihitung sebelumnya. Bila tidak demikian, maka pengeluaran dapat dikategorikan sebagai pemborosan jika tidak melekat pada proses produksi, dapat dihindarkan, dan tidak dapat dihitung sebelumnya.³³

Mulyasa menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan secara keseluruhan menuntut kemampuan suatu lembaga pendidikan atau sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan secara efektif dan transparan.³⁴

³² Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 219.

³³ Agus Irianto, *Pendidikan sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa* (Jakarta: Kencana, 2013), 18.

³⁴ E. Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), 194.

Dedi Supriadi menyatakan bahwa biaya pendidikan adalah salah satu komponen instrumental (instrumental input) yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang, dan tenaga.³⁵

Dari beberapa definisi tersebut, pembiayaan pendidikan dapat dipahami sebagai ongkos atau biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk uang, barang, dan tenaga.

Secara operasional, tahapan atau prosedur dalam pembiayaan pendidikan, meliputi:

a. Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan (*Planning*) Pembiayaan Pendidikan

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal.³⁶

Perencanaan pembiayaan pendidikan mencakup penyusunan anggaran belanja yang terdiri dari sumber pendapatan, pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana

³⁵ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 3.

³⁶ Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2009), 9-14.

prasarana, bahan dan alat pengajaran, honorarium dan kesejahteraan. Pengertian tersebut mengandung unsur-unsur bahwa dalam perencanaan ada proses, ada kegiatan yang rasional dan sistematis serta adanya tujuan yang akan dicapai.³⁷

Perencanaan dalam pembiayaan ialah kegiatan merencanakan sumberdana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan sekolah. Perencanaan pembiayaan sekolah disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang. Pengembangan jangka pendek berupa pengembangan satu tahunan. Pengembangan jangka panjang berupa pengembangan lima tahunan, sepuluh tahunan, bahkan dua puluh lima tahunan. Berdasarkan rencana pengembangan madrasah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, maka dibuatlah perencanaan pembiayaan sekolah.³⁸

Yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembiayaan sekolah antara lain menganalisis program kegiatan dan prioritasnya, menganalisis dana yang ada dan yang mungkin bisa diadakan dari berbagai sumber pendapatan dari berbagai kegiatan.

Ada empat langkah atau tahap dasar perencanaan, yaitu:

• *Pertama*, tahapan menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan. Tanpa rumusan

³⁷ E. Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), 81.

³⁸ Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), 167.

tujuan yang jelas, sebuah lembaga akan menggunakan sumber daya yang secara tidak efektif.

Kedua, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan kondisi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang.

Ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan, kekuatan, kelemahan serta hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dipahami faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu mencapai tujuan, atau mungkin menimbulkan masalah.

Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan.³⁹

Perencanaan pembiayaan pendidikan dalam hal keuangan perlu dilakukan, hal ini disebut juga dengan penganggaran. Penganggaran (budgeting) merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget). Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga.⁴⁰

³⁹ Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), 167.

⁴⁰ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 47.

b. Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan (*Actuating*) Pembiayaan Pendidikan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁴¹

Setelah perencanaan pembiayaan pendidikan selesai dan disetujui oleh semua komponen yang terlibat, dan menghasilkan sebuah Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM), tahapan manajemen selanjutnya yaitu pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Kegiatan pelaksanaan pembiayaan madrasah meliputi dua kegiatan besar yakni penerimaan dan pengeluaran.

1) Penerimaan Biaya Pendidikan

Penerimaan menggambarkan atas besarnya dana yang diterima lembaga dari setiap dana. Sumber keuangan pada sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu (1) pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan (2) orang tua peserta didik, dengan kerelaan membayar biaya

⁴¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 70.

pendidikan akan timbul sebagai bagian adanya rasa kepuasan yang diperoleh orang tua untuk turut menikmati kualitas yang diperoleh putra-putri mereka (3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Pendanaan pemerintah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Karena itu rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memperoleh pendidikan.

2) Pengeluaran Biaya Pendidikan

Pengeluaran menggambarkan besarnya yang dikeluarkan untuk tiap komponen program. Chon mengatakan bantuan keuangan sekolah lanjutan hampir seluruhnya dibiayai oleh dana pemerintah dan bagi sekolah swasta, dana yang diberikan terbatas.

Administrator pendidikan perlu meneliti untuk memutuskan pilihan jumlah biaya keseluruhan suatu program pendidikan. Untuk mengetahui arah yang akan diambil, terlebih dahulu harus diketahui kedudukan pendidikan sekarang pemimpinnya dengan meneliti berapakah biaya yang dipergunakan, apakah angka-angka yang biasanya dikemukakan pada pilihan benar-benar biaya yang harus diperhitungkan pengeluaran tersebut antara lain gaji guru, pemeliharaan gedung, biaya perobatan, buku-buku, bahan-bahan pelajaran di laboratorium, alat peraga pendidikan dan alat tulis.⁴²

⁴² Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 258.

Dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif dan efisien. Artinya segenap perolehan dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan di sekolah.

c. Peran Serta Masyarakat dalam Evaluasi (*Evaluation*) Pembiayaan Pendidikan

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran.⁴³

Evaluasi juga dapat diartikan suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.⁴⁴ Djuju mendefinisikan Evaluasi adalah kegiatan yang bermaksud untuk mengetahui apakah tujuan yang telah

⁴³ Echols dan Shadily, Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia, (Dictionary. Jakarta : PT. Gramedia, 2000), 220.

⁴⁴ Yunanda, *Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2009), 9.

ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan.⁴⁵

Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana bahwasannya kegiatan dari pembiayaan adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Pengurusan ini meliputi dua hal yaitu pertama, pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama yakni menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang⁴⁶ dalam hal ini dapat ditarik kekesimpulan bahwa proses evaluasi dalam hal laporan itu perlu dituliskan secara detail.

Evaluasi merupakan bagian integral dari pengelolaan pendidikan, baik tingkat sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, maupun departemen. Adapun yang akan dibahas dalam evaluasi pembiayaan adalah mengenai kesesuaian anggaran dan pertanggung jawaban keuangan.

1) Kesesuaian Anggaran

Anggaran adalah rencana yang diformulasikan dalam bentuk rupiah untuk jangka waktu tertentu (pendek), serta alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian aktivitas. Anggaran memiliki peran penting dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi aktivitas yang dilakukan oleh sekolah. Untuk itu, setiap penanggung jawab

⁴⁵ Djuju Sudjana, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah Untuk Pendidikan Non Formal Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 7.

⁴⁶ Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2009), 318.

program mencatat anggaran serta melaporkan realisasinya sehingga dapat dibandingkan selisih antara anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut perbaikan. Ada tiga bagian pokok anggaran suatu unit pemerintah yaitu:

- (a) Target penerimaan
- (b) Rencana pengeluaran
- (c) Sumber dana lainnya, yaitu sisa dana periode sebelumnya menjadi saldo awal periode berjalan.

2) Pertanggungjawaban Keuangan

Pertanggungjawaban merupakan transparansi dalam mengelola keuangan. Model bentuk keuangan dapat berbeda-beda sesuai dengan sumber anggarannya. Pada prinsipnya pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan mengikuti aturan dari donatur atau sumber anggaran. Namun demikian prinsip transparansi dan kejujuran dalam pertanggung jawaban tersebut harus dijunjung tinggi.⁴⁷

Pertanggungjawaban pemerintah dan pengeluaran biaya sekolah dilaksanakan dalam bentuk laporan bulanan dan triwulan kepada: 1) Kepala Dinas Pendidikan, 2) Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD), 3) Kantor Dinas Pendidikan.

Pertanggung jawaban yang dikenal dengan biaya yang dipertanggungjawabkan (UYHD), dilaporkan setiap bulan kepada

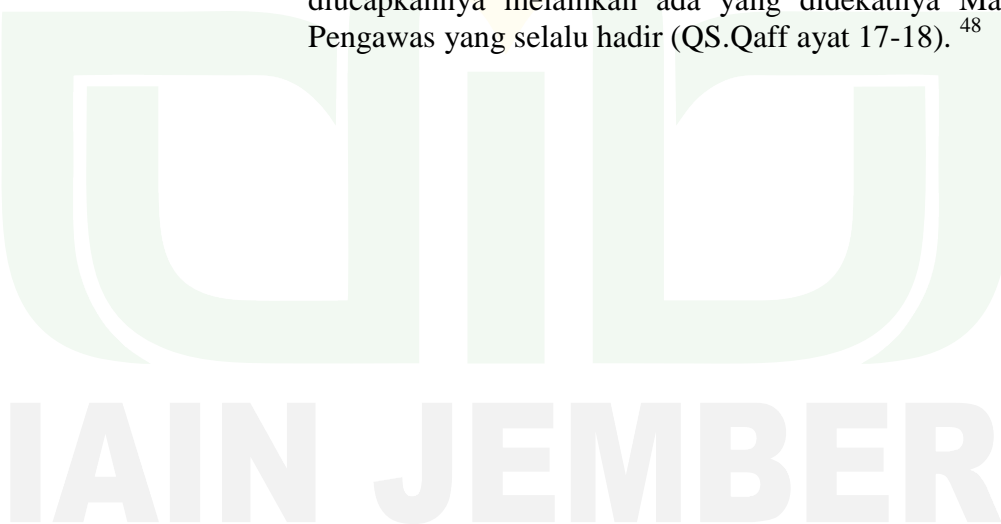
⁴⁷ Sulthon dan Khusnuridlo, *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Perspektif Global*, (Yogyakarta: Laksbang PREESindo, 2006), 267.

pihak yang ditetapkan sesuai dengan format dan ketetapan waktu. Khusus untuk biaya komite sekolah bentuk pertanggungjawaban terbatas pada tingkat pengurus dan tidak secara langsung kepada orang tua peserta didik.

Semua bentuk kegiatan yang sedang maupun yang sudah dilaksanakan perlu adanya evaluasi atau pengawasan sebagaimana firman Allah QS Qaff ayat 17-18 yang berbunyi:

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَفِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

Artinya: yaitu ketika dua orang Malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada yang didekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir (QS.Qaff ayat 17-18).⁴⁸



⁴⁸Al-Qur'an dan Terjemah, Qaff ayat 17-18.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Artinya suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi social tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.⁴⁹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan pengertian kualitatif itu sendiri adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁰

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang bersifat menggambarkan, menuturkan dan menafsirkan data yang ada dan menghasilkan data deskriptif yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dan data tersebut bersifat pernyataan. Menurut Moleong kualitatif deskriptif dalam penelitian dilakukan dengan beberapa pertimbangan pertama. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jaman. Kedua, metode ini lebih

⁴⁹ Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 25.

⁵⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2009), 4.

peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola yang di nilai.⁵¹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) SA Miftahul Ulum yang beralamat di Jalan KH. A. Yasin No. 02, Desa Sodong Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember – Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena MTs ini merupakan salah satu Mts yang tidak hanya mengandalkan pembiayaan yang diberi oleh pemerintah akan tetapi lembaga ini juga membangun kepercayaan dikalangan masyarakat sekitar untuk juga ikut berperan serta dalam pembiayaan pendidikan.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijangin sehingga validitasnya dapat dijamin.

Subyek penelitian ini adalah benda, hal atau orang, tempat melekatnya data atau variabel penelitian yang dipermasalahkan.⁵² Adapun subyek dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kepala Madrasah Tsanawiyah SA Miftahul Ulum
2. Bendahara Madrasah Tsanawiyah SA Miftahul Ulum
3. Ketua Komite Madrasah
4. Wali Murid dan Masyarakat

⁵¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 9-10.

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bima Aksara, 2002), 18.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁵³

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala subyek atau obyek yang diselidiki, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang khusus yang sengaja diadakan.⁵⁴ Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Observasi berperan serta (*participant observation*), dalam observasi ini peneliti terlibat aktif dalam kegiatan sehari-hari orang yang akan diteliti. Sambil meneliti, peneliti ikut melakukan kegiatan dan merasakan suka duka sumber data.
- b. Observasi nonpartisipan, dalam observasi ini peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

Peneliti akan menggunakan observasi nonpartisipan, yaitu peneliti tidak ikut dalam kegiatan yang akan di observasi. Data yang diperoleh dari teknik observasi ini adalah sebagai berikut:

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 308.

⁵⁴ John W. Creswell, *Research Design* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 267.

- a. Lokasi atau tempat MTs Sa Miftahul Ulum Jember
- b. Kondisi objek penelitian
- c. Sarana dan prasarana penunjang pendidikan
- d. Mengamati secara langsung proses pembiayaan pendidikan dari masyarakat

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan menemui objek secara langsung untuk dimintai keterangan sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu⁵⁵. Tujuan wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah untuk memperoleh berbagai informasi tentang apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan⁵⁶. Wawancara dimaksudkan untuk mengungkap apa yang tersembunyi di balik kejadian atau apa yang dikatakan orang.

Esterberg mengemukakan yang dikutip oleh Sugiyono, bahwa terdapat beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi struktur dan tidak struktur. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu peneliti tidak terjebak dengan daftar pertanyaan, akan tetapi fokus pada subjek dan objek penelitian. Tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka

⁵⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 180.

⁵⁶ Nurul Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 184.

dan jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

Pada teknik pengumpulan data dengan wawancara diharapkan dapat memperoleh data berupa penjelasan dari berbagai sumber berupa fakta-fakta, atau realita yang terjadi di lembaga tersebut. Paparan-paparan yang diharapkan berupa penjelasan mengenai pembiayaan pendidikan di Mts SA Miftahul Ulum Jember dari berbagai sumber atau informan yang sudah ditentukan.

3. Dokumentasi

Selain menggunakan teknik observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵⁷

⁵⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, 82.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif kualitatif Miles and Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus.⁵⁸

Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut penjelasan analisis data model interaktif Miles and Huberman.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah kegiatan pengumpulan data tahap awal yang dilakukan peneliti dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan pita rekaman.⁵⁹ Sesuai dengan data materi, observasi dilakukan saat pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTs Sa Miftahul Ulum.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman yang telah disiapkan peneliti dan *Handpone* sebagai alat perekam suara kemudian

⁵⁸ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohini (Jakarta: UI Pers, 2014), 20.

⁵⁹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif...*, 15.

hasil disalin dalam bentuk dialog. Dokumentasi diperoleh dari lembaga pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTs Sa Miftahul Ulum.

2. Kondensasi data

Kondensasi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa dengan kondensasi data peneliti dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat dan menggolongkannya satu pola yang lebih luas.⁶⁰

Kegiatan yang dilakukan peneliti saat mekondensasi data adalah merangkum data, memilah dan memilih data-data yang terkait dengan materi, media dari hasil observasi dan wawancara dengan informan yang menjadi subyek penelitian dan membuang data yang di anggap tidak ada kaitannya dengan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan data dari hasil dokumentasi.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan data yang sudah dikondensasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberi adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian data dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.⁶¹

Peneliti menyajikan data yang telah diperoleh terkait dengan perencanaan,

⁶⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif...*, 16.

⁶¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif...*, 17.

pelaksanaan, dan melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi dalam bentuk data.

Tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah dikondensasi. Penyajian data dilakukan untuk menyajikan data-data yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan untuk menarik makna dari data yang disajikan, pada tahap ini peneliti mencari makna dari data yang telah dikondensasi dengan cara membandingkan, mencari pola, tema, hubungan persamaan, mengelompokkan, dan memeriksa hasil yang telah diperoleh dalam penelitian.⁶²

Peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan data-data yang telah didapat peneliti dari data yang sudah disajikan tentang peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, penelitian, teori), pembahasan oleh

⁶² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif...*, 19.

teman sejawat analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil dengan mengecek anggota.⁶³

Dalam pengujian keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁶⁴ Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah triangulasi sumber dan metode karena berdasarkan jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif. Langkah yang akan dilakukan dengan triangulasi sumber adalah peneliti akan membandingkan atau mengecek data yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Sedangkan triangulasi metode, yang akan dilakukan peneliti adalah dengan cara mengecek atau membandingkan data yang di peroleh dari penggunaan metode metode pengumpulan data yang berbeda.

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, hingga pada penulisan laporan.⁶⁵

Tahap-tahap penelitian bertujuan untuk mengetahui proses penelitian yang dilalui oleh peneliti mulai awal hingga akhir. Tahapan-tahapan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Tahap Pra Penelitian Lapangan

Dalam tahap pra lapangan ini terdapat enam tahapan yang dilalui oleh peneliti sendiri. Adapun enam tahapan tersebut antara lain:

⁶³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan...*, 47.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 245-249.

⁶⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan...*, 73.

a. Menyusun rencana penelitian

Pada tahapan ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik, penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan dilanjutkan penyusunan proposal penelitian hingga presentasi.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian seorang peneliti terlebih dahulu memilih lapangan atau lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Lapangan atau lokasi yang dipilih peneliti adalah MTs Sa Miftahul Ulum Panti Jember.

c. Mengurus Surat Perijinan

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti mengurus surat perijinan terlebih dahulu ke pihak kampus. Setelah meminta surat perizinan, peneliti menyerahkan kepada Kepala Madrasah MTs Sa Miftahul Ulum untuk mengetahui apakah diizinkan mengadakan penelitian atau tidak.

d. Menjajaki dan Menilai Lapangan

Pada tahapan ini peneliti mulai melakukan penjajakan dan meneliti lapangan untuk lebih mengetahui latar belakang objek penelitian, hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menggali data.

e. Memilih Informan

Tahap ini peneliti memilih informan yang dianggap tahu situasi dan kondisi di lapangan dengan maksud untuk mendapatkan data melalui wawancara ataupun dokumentasi yang diperlakukan saat melakukan penelitian.

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Setelah semuanya selesai dari mulai rancangan penelitian hingga memilih informan, maka peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian sebelum terjun kelapangan yakni mulai menyiapkan buku catatan, kertas dan lain sebagainya.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian dan mulai mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. Pada tahap ini pula peneliti mulai menyusun laporan hasil penelitian dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing karena mungkin ada revisi untuk mencapai hasil penelitian maksimal. Laporan yang sudah selesai dan siap dipertanggungjawabkan di depan penguji yang kemudian digandakan untuk diserahkan kepada pihak terkait.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

a. Sejarah Singkat MTs Miftahul Ulum

MTs SA Miftahul Ulum adalah salah satu lembaga pendidikan dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Lembaga pendidikan ini awalnya berdiri pada tahun 2007 tapi belum mengajukan ijin proposal, hal ini atas permintaan dan persetujuan masyarakat setempat untuk diadakannya sebuah lembaga pendidikan resmi. Setahun kemudian ada bantuan dari pemerintah Australia, jadi pihak sana memberikan nama SA (Satu Atap). Akan tetapi lembaga yang pertama kali di dirikan adalah MI Miftahul Ulum, sebagai sarana mengajar pada anak-anak sekitar. Dan Lokasi MTs harus berdekatan dengan MI. Karena MI sudah ada, jadi kita ajukan satu atap, sudah hampir 11 tahun. Saat pembangunan tahun 2007 dibantu warga sekitar, lokasinya didepan halaman yang saat ini pindah ke belakang. Ada dua lokal, satu untuk kantor satu untuk kelas dan pada tahun 2008 ada bantuan pemerintah berupa gedung.

Kemudian atas ridho Allah dan atas respon positif masyarakat sekitar, maka K.H Ahmad Lutfi selaku ketua Yayasan meresmikan lembaga pendidikan MTs SA Miftahul Ulum Panti Jember pada tahun 2008, hingga saat ini lembaga masih terus berjalan dan mengalami perkembangan disetiap tahunnya.

b. Nama Lengkap Madrasah

Nama lengkap madrasah adalah Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Miftahul Ulum. Pemilihan nama lembaga ini dinisbatkan kepada nama pengasuh pertama yang didirikan pada Tahun 2008.

c. Identitas Sekolah

Identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus. Jika disandingkan dengan kata Sekolah (Identitas Sekolah) maka penjelasan yang spesifik mengenai ciri-ciri atau wajah secara detail dari sekolah atau lembaga tersebut. Maka identitas Sekolah MTs SA Miftahul Ulum merupakan lambang khusus yang menjelaskan keberadaan lembaga ini secara komprehensif. Berikut Identitas Sekolah MTs SA Miftahul Ulum.

Tabel 4.1⁶⁶
Identitas Sekolah
Madrasah Tsanawiyah SA Miftahul Ulum

IDENTITAS SEKOLAH	
NAMA SEKOLAH	MTs SA Miftahul Ulum
NOMOR STATISTIK	121235090167
PROVINSI	JAWA TIMUR
PEMERINTAH KOTA/KAB.	JEMBER
KECAMATAN	PANTI
DESA/KELURAHAN	KEMIRI
JALAN DAN NOMOR	JL. KH. Achmad Yasin No. 2 sodong
KODE POS	68153
TELEPON	081336470797
DAERAH	PEDESAAN
STATUS SEKOLAH	SWASTA
KELOMPOK SEKOLAH	C
AKREDITASI	TERDAFTAR
TAHUN BERDIRI	2007
KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	PAGI
BANGUNAN SEKOLAH	MILIK SENDIRI

⁶⁶ Dokumentasi data MTs SA Miftahul Ulum 2019.

LOKASI SEKOLAH	TERPENCIL
JARAK KE PUSAT KECAMATAN	15 km
JARAK KE PUSAT KOTA/KABUPATEN	Kurang Lebih 30 km.
TERLETAK PADA LINTASAN	DESA
ORGANISASI PENYELENGGARA	YAYASAN
PERJALANAN PERUBAHAN SEKOLAH	LEMBAGA

d. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah

Visi dan misi merupakan impian yang harus diwujudkan. Dalam setiap organisasi atau lembaga pasti memiliki mimpi yang menjadi prioritas utama dalam menjalankan roda-roda organisasi atau mengoperasikan lembaga tersebut, maka dari itu Madrasah Tsanawiyah SA Miftahul Ulum juga memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi: terwujudnya lulusan Madrasah Tsanawiyah yang beriman, berilmu dan beramal sholeh, serta memiliki daya saing dalam bidang iptek dan berwawasan lingkungan.

Misi: untuk mencapai visi di atas, maka Madrasah kami memiliki misi:

- a. Menumbuh kembangkan sikap, prilaku dan amaliah islam di Madrasah.
- b. Menumbuhkan semangat belajar ilmu keagamaan Islam.
- c. Melaksanakan bimbingan dan pembelajaran secara aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki.

- d. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif dan daya saing yang sehat kepada seluruh warga madrasah baik dalam prestasi akademik maupun non akademik.
- e. Menciptakan lingkungan madrasah yang sehat, bersih dan indah.
- f. Mengembangkan sikap kepekaan terhadap lingkungan.

e. Struktur Organisasi

Struktur adalah posisi hirarki dari lembaga yang menjelaskan tugas pokok dan fungsi secara proporsional. Sedangkan organisasi atau lembaga merupakan wadah tempat orang-orang mengembangkan potensi atau skill secara sistematis. Maka struktur lembaga MTs SA Miftahul Ulum merupakan susunan pengurus yang bekerja dengan kewenangan atau tanggung jawab secara proporsional. Adapun struktur MTs SA Miftahul Ulum sebagai berikut.

Tabel 4.2⁶⁷

Struktur Lembaga Madrasah Tsanawiyah SA Miftahul Ulum

KETUA YAYASAN	Achmad Lutfi, S.Pd.I
KEPALA MADRASAH	Wahyu Aji Sasmito, S.P.
KOMITE	Moh. Muafi
WAKA KURIKULUM	Abdus Salam, S.Pd.
WAKA KESISWAAN	Jimi Alaina KA.S.Pd.
WAKA SARPRAS	M. Shohibul Izar, S.Pd.
WAKA HUMAS	Ony Fahmiansyah, S.Pd.
KEPALA TATA USAHA	Moh.Ali Wafa, S.pd.I.
BENDAHARA	Moh.Wafir, S.Pd.
KEPALA PERPUSTAKAAN	Chindy Precillia
BIMBINGAN KONSELING	Moh.Wafir S.Pd.
KEPALA LABORATORIUM	Choirul Anwar.S.Pd.
WALI KELAS VII	Siti Nur Kholifah
WALI KELAS VIII	Venche Dewayant, S.E.
WALI KELAS IX	Yuli Wulandari

⁶⁷ Dokumentasi data MTs SA Miftahul Ulum 2019.

f. Keadaan Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar merupakan subjek yang bertanggung jawab untuk mentransformasikan ilmu pengetahuannya kepada objek (murid). Dalam hal ini lebih tepatnya disebut sebagai Guru yang berperan memberikan pengetahuannya kepada siswa. Maka adapun beberapa uraian Tenaga Pengajar di MTs SA Miftahul Ulum sebagaimana berikut:

Tabel 4.3⁶⁸
Data Tenaga Pengajar
Madrasah Tsanawiyah SA Miftahul Ulum

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Jabatan	Mata Pelajaran
1.	Wahyu Aji Sasmito, S.P.	Jember, 20 Maret 1986	Kepala Madrasah	-
2.	Abdus Salam, S.Pd.	Jember, 28 Januari 1984	Waka Kurikulum	Bahasa Inggris
3.	Moh. Ali Wafa, S.Pd.I.	Sumenep, 23 Februari 1992	TU	Qurdis
4.	Moh. Wafir	Jember, 7 Maret 1990	Bendahara	Fiqih
5.	Izya Rosita, S.Pd.	Jember, 23 Desember 1988	Guru	MTK
6.	Jimi Alaina Khoirul Arabiyah, S.Pd.	Aceh, 1 Mei 1992	Waka Kesiswaan	MTK
7.	Yuli Wulandari Wijaya, S.S.	Jember, 17 Oktober 1991	Wali Kelas IX	Bahasa Indonesia
8.	Gatod Suyanto, S.Pd.	Jember, 22 Agustus 1978	Guru	IPS
9.	Choirul Anwar, S.Pd.	Jember, 25 Juli 1991	KA Laboratorium	IPA
10.	Venche Dewayanti, S.E.	Jember, 23 Maret 1982	Wali Kelas VIII	SBK/Prakarya
11.	Moh. Shohibul Izar, S.Pd.	Jember, 16 Agustus 1994	WAKA Sarpras	SKI
12.	Ony	Jember, 10	WAKA	Penjasorkes

⁶⁸ Dokumentasi data MTs SA Miftahul Ulum 2019.

	Fahminsyah, S.Pd.	Oktober 1992	Humas	
13.	Siti Miftahul Ulum, S.Pd,I.	Jember, 8 Juli 1993	Guru	Bahasa Arab
14.	Siti Nurkholifah	Jember, 18 Juli 1995	Wali Kelas VII	PKN
15.	Chindy Precillia	Jember, 26 Oktober 1998	KA Perpustakaan	Aqidah Akhlag

g. Keadaan Siswa

a. Jumlah Siswa

TABEL 4.4⁶⁹
Data Siswa
Madrasah Tsanawiyah SA Miftahul Ulum

No	Kelas	Jenis kelamin		Jumlah	Keterangan
		L	P		
1	VII	4	11	15	1 Rombongan belajar
3	VIII	13	11	24	1 rombongan belajar
4	IX	8	17	25	1 rombongan belajar
	Jumlah	25	39	64	4 rombongan belajar

b. Kegiatan-kegiatan Siswa

Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di MTs

SA Miftahul Ulum, antara lain:

- 1) Kepramukaan
- 2) Sepak Bola
- 3) Seni Bela Diri

⁶⁹ Dokumentasi data MTs SA Miftahul Ulum 2019.

h. Keadaan Sarana dan Prasarana

a. Sarana Madrasah

Sarana sebagai pelengkap atau barang yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pengajaran antara lain:

- 1) Berupa Buku
 - a) Buku bacaan siswa
 - b) Buku pelajaran
 - c) Buku penunjang/pelengkap
- 2) Berupa Alat Bantu Pengajaran
 - a) Peta dunia/globe
 - b) Peta Indonesia dan pulau-pulau di Indonesia
 - c) Peralatan DVD player, televisi, viwer dan CD pembelajaran

b. Prasarana Madrasah

Prasarana yang dimiliki MTs SA Miftahul Ulum antara lain:

TABEL 4.5⁷⁰
Data Prasarana Madrasah
Madrasah Tsanawiyah SA Miftahul Ulum

No.	Nama Perlengkapan	Jumlah	Keadaan	Keterangan
1	Ruang kelas	3	Baik	
2	Ruang pimpinan	1	Baik	
3	Ruang laboratorium IPA	1	Baik	
4	Ruang perpustakaan	1	Baik	
5	Ruang TU	1	Baik	
6	Ruang UKS	1	Baik	
7	Ruang Konseling	1	Baik	
8	Ruang guru	1	Baik	
9	Jamban	3	Baik	
10	Tempat bermain/berolahraga	1	Baik	
11	Gudang	1	Baik	

⁷⁰ Dokumentasi data MTs SA Miftahul Ulum 2019.

12	Ruang OSIS	1	Baik	
13	Tenaga parkir	1	Baik	
14	Tempat beribadah	1	Baik	

i. Hubungan Madrasah dengan Masyarakat

MTs SA Miftahul Ulum berlokasi di Jl. KH. A.Yasin No 02 Sodong Jember 68135 Desa Kemiri Kecamatan Panti, penduduk sekitar Madrasah mayoritas beragama Islam dengan latar belakang mata pencaharian mayoritas sebagai petani dan pekerja kopi.

Adapun batas-batas MTs SA Miftahul Ulum sebagai berikut:⁷¹

- a. Sebelah Barat : Persawahan
- b. Sebelah Timur : Sekolah MI SA Bustanul Ulum
- c. Sebelah Utara : Sekolah MA Bustanul Ulum
- d. Sebelah Selatan : Pemukiman Penduduk

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada tahap ini peneliti akan menyajikan beberapa hasil data yang didapat selama melakukan proses penelitian, kemudian dimasukkan ke dalam bagian ini sesuai dengan prosedur penelitian dan fokus penelitian yang diambil oleh peneliti, lalu dipaparkan secara rinci sesuai dengan temuan data-data dari lokasi penelitian, baik data berupa hasil observasi maupun data hasil wawancara.

Jadi, pada pembahasan ini peneliti menguraikan kondisi yang sebenarnya mengenai peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di

⁷¹ Dokumentasi data MTs SA Miftahul Ulum 2019.

MTs SA Miftahul Ulum. Berikut ini merupakan hasil data yang diperoleh diantaranya:

1. Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Pembiayaan Pendidikan di MTs SA Miftahul Ulum

Pada kesempatan kali ini penulis akan mengklasifikasikannya menjadi tiga bagian yakni perencanaan dana operasional, dan pengadaan barang. Berikut penjelasan disetiap pointnya.

a. Perencanaan Dana Operasional

Dana operasional merupakan kebutuhan primer lembaga atau madrasah yang menunjang stabilitas berjalannya MTS SA Miftahul Ulum. Seperti gaji guru, pengadaan sarana prasarana dan segala unsur pokok yang harus dirumuskan oleh lembaga. Seperti yang dilakukan dalam MTS SA Miftahul Ulum dalam merencanakan anggaran biaya disetiap periodenya, berikut yang dikatakan oleh Bapak Wahyu Aji Sasmito sebagai Kepala Madrasah:

“Dalam kegiatan perencanaan pembiayaan di madrasah ini dilakukan dua kegiatan yaitu penyusunan anggaran dan pengembangan anggaran, anggaran itu merupakan rencana pemasukan dan pengeluaran yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu satu tahun kedepan. Kemudian, sebelum ada kegiatan rutin kita kumpulkan masyarakat dan wali murid, kita sampaikan bahwa akan ada kegiatan rutin setiap tahun dan kita sampaikan anggarannya. Juga dalam setiap tahun peran serta masyarakat meningkat, mereka tidak hanya menyumbang uang, tapi ada yang menyumbang peralatan sound, dan drumband untuk kegiatan sekolah”.⁷²

⁷² Wahyu Aji Sasmito, *wawancara*, Jember 28 Juni 2019.

Perencanaan memang hal yang utama dalam mencapai tujuan. Karena perencanaan merupakan proses memikirkan dan menetapkan kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan dilakukan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu.

Senada dengan wawancara Bapak Wafir selaku Bendahara

Madrasah:

“Perencanaan diserahkan sepenuhnya ke pihak sekolah, setelah dibuat perencanaan ada rapat RKAM (Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah). Didalam rapat itu nanti semua bapak/ibu guru melaporkan isi dari perencanaan yang telah dibuat untuk satu tahun kedepan dan setelah disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam rapat RKAM maka langkah selanjutnya yaitu akan diagendakan ke Yayasan.”⁷³

Penjelasan diatas senada dengan yang terjadi di lapangan bahwasanya masyarakat ikut serta dalam merencanakan RKAM madrasah baik yang akan dilakukan pada jangka pendek atau jangka panjang. Pada saat rapat dilaksanakan masyarakat juga memberikan masukan kepada pihak lembaga dan yayasan mengenai rencana biaya pendidikan dan rencana implementasi dari biaya tersebut.⁷⁴ Hal yang terjadi pada saat observasi dapat dibuktikan pada gambar dibawah ini.

IAIN JEMBER

⁷³ Mohammad Wafir, *wawancara*, Jember 01 Juli 2019.

⁷⁴ Observasi pertemuan wali murid pada tanggal 01 juli 2019.

4.1 Gambar Musyawarah dengan Masyarakat⁷⁵



Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Muafi selaku Komite Madrasah:

“Dalam penyusunan anggaran kegiatan dan anggaran Madrasah, Yayasan dan pihak Madrasah menyeleksi kegiatan apa saja yang harus dibiayai sesuai dengan kategori program pendidikan yang diselenggarakan atau ditingkatkan tahun ini. Melihat sumber dana secara keseluruhan yang didapatkan dilembaga ini dari dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan biaya infak. Maka sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait penggunaan dana Bos yang harus menunjang kepada proses pembelajaran maka setelah diketahui sumber anggaran tersebut kemudian ditentukan dana tersebut dapat dialokasikan sesuai dengan RKAM. Kalau peran masyarakat dalam perencanaan pembiayaan madrasah itu memberi saran ataupun pendapat dari hasil program yang sudah disosialisasikan oleh pihak madrasah pada saat tahun ajaran baru dan akhir (pengambilan raport dan imtihan).”⁷⁶

⁷⁵ Dokumentasi, MTs SA Miftahul Ulum, Jember 01 Juli 2019.

⁷⁶ Moh Muafi, *wawancara*, Jember 09 Juli 2019.

Selain dari hasil wawancara dan observasi diatas hal ini di perkuat dengan adanya “berkas rencana kegiatan anggaran madrasah (RKAM)”.⁷⁷

Dari hasil wawancara di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam perencanaan pembiayaan di MTs SA Miftahul Ulum melalui hasil dari penyusunan RKAM yang sudah ditetapkan oleh madrasah dan masyarakat yaitu memberikan ide ataupun saran guna untuk memperbaiki program-program yang diagendakan oleh madrasah.

b. Pengadaan Sarana Prasarana

Sarana prasarana merupakan kebutuhan barang dan peralatan yang menunjang proses pembelajaran. Dalam hal ini, usaha pengadaan sarpras oleh madrasah dimusyawarahkan bersama oleh struktur kelembagaan madrasah yang menjadi tanggung jawab Waka Sarpras, yang kemudian dinarasikan dalam proposal pengadaan Sarpras untuk diajukan kepada Kementerian Agama (KEMENAG), melihat status lembaga sudah dibawah naungan Kementerian Agama. Berikut pernyataan dari Bapak M. Shohibul Izar selaku Waka Sarpras:

“Pengadaan sarpras madrasah kami rencanakan setiap tahun ajaran baru. perencanaan ini sifatnya dinamis, melihat kebutuhan barang barang dan perlengkapan sewaktu-waktu dapat ditemukan dilapangan oleh guru-guru dan elemen lainnya, maka semua masukan dan usulan kami catat dan kemudian kami ajukan dalam proposal pengadaan barang kepada kementerian, selain itu jika kebutuhan sarpras

⁷⁷ Dokumentasi data MTs SA Miftahul Ulum 2019.

menunjang kepada pembelajaran madrasah kami juga mengambil dana BOS untuk melengkapinya.”⁷⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Muafi selaku Komite

Madrasah:

“Sewaktu-waktu dalam keberlangsungan proses pembelajaran, guru-guru membutuhkan alat atau barang yang menunjang pembelajaran ini, seperti alat-alat olahraga (Bola sepak, Bola volly, Net dan lain sebagainya) maka kebutuhan ini menjadi penunjang kemajuan kualitas siswa yang sering kali ditemukan oleh semua guru. Semisal juga jika ada sarpras yang sudah rusak atau tidak layak pakai dan kebutuhan lainnya maka setiap akhir tahun ajaran kami sampaikan kepada bapak Waka sarpras untuk segera melengkapinya.”⁷⁹

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya semua sarana prasarana yang harus dilengkapi terlebih dahulu mengajukan proposal kepada Kementerian Agama agar barang itu bisa dapat diterima, melalui suntikan dana yang diberikan oleh Kementerian. Tetapi peneliti menemukan nilai simpatik yang dilakukan oleh wali murid dan warga yang juga ikut memberikan sumbangan dana atau barang kepada Madrasah SA Miftahul Ulum.

Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Edy Wardono selaku tokoh masyarakat:

“Warga dan segenap wali murid, juga antusias untuk kemajuan lembaga ini. Sebab melihat sarpras yang masih tidak lengkap maka kami memberikan sebagian bantuan berupa barang atau uang, seperti drumband, rebana dan lain sebagainya. Sebab barang barang yang dianggarkann oleh pemerintah tidak semuanya akan diterima, seperti hadrah dan drumband yang

⁷⁸ M. Shohibul Izar, *wawancara*, Jember 05 Juli 2019.

⁷⁹ Moh. Muafi, *wawancara*, Jember 09 Juli 2019.

sudah sejak lama alat-alat ini tidak dimiliki oleh lembaga karena tidak memiliki dana yang banyak.”⁸⁰

Begitupun yang disampaikan oleh Bapak M. Shohibul Izzar selaku Waka Sarpras:

“Perihal sarpras yang masih tidak lengkap, kebutuhan itu lembaga ajukan semuanya kepada kementerian, selain juga mendapat dana BOS, tetapi kementerian menyesuaikan dengan besaran biaya infak siswa. Melihat besaran biaya infak yang ditetapkan kepada setiap siswa perbulannya sebesar 15 ribu Rupiah dengan jumlah siswa 67 maka akumulasi dana yang terkumpul tidak mungkin melengkapi semua sarpras yang diajukan kepada Kementerian. Berbeda lagi jika wali murid memang tidak mampu membayar infak setiap bulannya, maka kebijakan lembaga jika ada yang tidak membayar, akan diberikan surat peringatan, kemudian akan dipanggil ke sekolah dan akan diminta dana semampunya.”⁸¹

Fenomena yang ditemukan oleh peneliti, melihat kebutuhan sarpras yang juga ditentukan dengan besaran biaya infak setiap bulan, jika dananya besar maka operasional yang didapatkan dari pemerintah juga besar. Selain dana dihasilkan dari uang infak, lembaga juga mengambilkan dari dana BOS, selebihnya bantuan itu diberikan oleh masyarakat beserta wali murid untuk memberikan dana ataupun barang semampu mereka, sementara ini masyarakat sudah memberikan sumbangan barang berupa, drumband, rebana, sound sistem kepada lembaga. Sehingga dapat cukup membantu untuk menambah soft skill dan hard skill beserta keterampilan dari siswa dalam belajar.

⁸⁰ Edy Wardono, *wawancara*, Jember 17 Juli 2019.

⁸¹ M. Shohibul Izzar, *wawancara*, Jember 05 Juli 2019.

Dari data yang kami dapatkan di atas madrasah melakukan perencanaan pembiayaan madrasah dengan mengikutsertakan atau ada peran serta masyarakat dalam merencanakannya

2. Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Apabila perencanaan pembiayaan MTs SA Miftahul Ulum selesai dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat, maka selanjutnya adalah pelaksanaan terhadap perencanaan yang telah dibuat. Dalam menjalankan lembaga ini, peneliti akan membagikan tupoksi dari semua elemen di Madrasah Tsanawiyah SA Miftahul Ulum. Berikut elemen dari setiap bagian yang bertugas melaksanakan keberlangsungan lembaga ini:

a. Ketua Yayasan

Ketua yayasan adalah penanggung jawab secara keseluruhan, tanggung jawab ini dipegang oleh Bapak Achmad Lutfi S.Pd.I sebagai Kepala Yayasan. Maka seluruh perencanaan, kinerja dan evaluasi harus dilaporkan satu pintu kepada Ketua Yayasan. Begitupun yang disampaikan oleh Bapak Wahyu Aji Sasmito sebagai

Kepala Madrasah:

“Sebenarnya semua perencanaan yang berkaitan dengan lembaga ini, seutuhnya wewenang dari ketua yayasan. Namun dalam pengambilan kebijakannya beliau tidak pernah otoriter atau seenaknya sendiri dalam memutuskan. Jika apa yang kami usulkan sebagai pengurus madrasah menjadi hal yang baik untuk kemajuan madrasah beliau tidak pernah menolaknya, pertimbangan yang diambil oleh beliau selalu bermuara kepada kemajuan lembaga ini. Sesekali beliau juga mengusulkan program-program untuk madrasah dan usulan itu tidak bersifat intruksi, beliau meminta saran terlebih

dahulu kepada kepala madrasah beserta staf stafnya, jika dianggap baik maka program itu diusahakan untuk berjalan.”⁸²

Sinergitas dalam ikatan struktur diutamakan dalam lembaga ini. Dari beberapa data yang ditemukan, peneliti memandang lembaga ini mengedepankan asas musyawarah mufakat, tidak kebijakan sepihak yang dihasilkan tanpa adanya musyawarah, sekalipun hal itu menjadi ideal dilakukan atas hak ketua yayasan atau kepala sekolah. Namun Madrasah Tsanawiyah SA Miftahul Ulum ini memberikan sebuah pelajaran bahwa lembaga pendidikan dijunjung oleh semua pihak, semangat kemajuan dari lembaga ini disokong oleh semua elemen sekalipun nilai antusias yang diberikan oleh wali murid.

b. Tugas Struktur Pengurus Madrasah dan Wali Murid Ikhwal Dana Pendidikan MTS SA Miftahul Ulum

Dalam hal ini Kepala Madrasah bertanggung jawab sebagai pelaksana dalam mengefektifkan pembuatan anggaran belanja di Madrasah. Kegiatan untuk membuat anggaran belanja bukanlah satu pekerjaan rutin, melainkan melibatkan pertimbangan-pertimbangan serta maksud daripada program pendidikan. Dana yang masuk maupun keluar harus berdasarkan pada bukti yang kuat, perintah tertulis dan rekapan pertanggungjawaban atas anggaran yang sudah dilaksanakan, dalam bentuk LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban)

⁸² Wahyu Aji Sasmito, *wawancara*, Jember 28 Juni 2019.

serta lampiran (bukti transaksi) karna itu akan menjadikan kebijakan untuk melakukan audit.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wafir sebagai Bendahara Madrasah:

“Bendahara bertugas sebagai pengatur apabila ada dana yang masuk dan melakukan pembukuan terhadap penerimaan dan pengeluaran dana MTs SA Miftahul Ulum. Selain itu, bendahara juga mengatur pengeluaran dana yang dialokasikan dalam kegiatan. Apabila ada pengeluaran dana, bendahara bertugas untuk menemui Kepala Madrasah supaya menyetujui pengeluaran tersebut.”⁸³

Secara garis besar struktur kepengurusan lembaga yang mengurus anggaran pendidikan, baik perencanaan kebutuhan besaran biaya secara keseluruhan selama satu tahun dicatat sesuai hasil kesepakatan dan melaporkan pengeluaran secara transparan selama satu tahun untuk kebutuhan proses belajar mengajar. Dalam hal ini menjadi tanggung jawab bendahara untuk membuat LPJ, jadi tugas secara umum dari pengurus lembaga dalam hal pembiayaan pendidikan, antara lain 1) Menerima biaya bantuan dari semua pihak, 2) Merencanakan kebutuhan pengeluaran dan 3) Melaporkan segala pengeluaran selama satu priode. Selain peran yang harus dikerjakan oleh pengurus lembaga untuk mengoperasikan segala biaya pembelajaran sesuai dan BOS dan Infak yang didapatkan, pembiayaan lain juga melibatkan peran masyarakat (wali murid).

⁸³ Mohammad Wafir, *wawancara*, Jember 01 Juli 2019.

Jadi dari pemaparan diatas bahwasanya kontribusi yang diberikan oleh masyarakat kepada Madrasah Tsanawiyah berupa dana, tenaga, ikut serta dalam menyiapkan sarana dan prasarana. Dan wali muridpun membantu hal-hal yang dibutuhkan oleh madrasah seperti membelikan sound system, drum band, dan kami juga kerja bakti dalam pembangunan gedung.

Senada dengan Bapak Edy Wardono sebagai tokoh masyarakat:

“Saya selaku perwakilan dari masyarakat membantu sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh madrasah seperti gedung rusak, kamar mandi rusak, atap bocor, dan hal lain yang perlu diperbaiki.”⁸⁴

4.2 Gambar Kerja Bakti Masyarakat dalam Pembangunan Sekolah⁸⁵



Semua pendapat yang disampaikan oleh sekian informan, bahwasanya masyarakat dan wali murid tidak hanya memberikan sumbangsih berupa finansial, wali murid dan masyarakat juga bergotong-royong untuk melakukan bantuan pembagunan lembaga dan juga memberikan bantuan berupa alat-alat yang menunjang

⁸⁴ Edy Wardono, *wawancara*, Jember 17 Juli 2019.

⁸⁵ Dokumentasi, MTs SA Miftahul Ulum, Jember 17 Juli 2019.

pembelajaran murid di sekolah. Kesadaran dan nilai simpati yang tinggi oleh wali murid membuat keberlangsungan pembelajaran lembaga di MTS SA Mifahul Ulum bisa dapat stabil.

Sumbangan yang diberikan oleh semua wali murid dilakukan setiap bulan satu kali. Namun data yang diperoleh dilapangan sumbangan dana yang diberikan oleh wali murid ada perbedaan jumlah biaya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Al-Fadili sebagai

Wali Murid:

“saya memberikan sumbangan setiap bulan sebesar lima belas ribu rupiah (Rp.15.000). Tetapi beberapa wali murid yang perekonomiannya menengah kebawah jumlahnya lebih sedikit atau bahkan tidak dibebani sumbangan untuk lembaga, sebab melihat kemampuan dari perekonomian mereka”.⁸⁶

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Wahyu Aji Sasmito

sebagai Kepala Madrasah:

“Beban sumbangan yang diberikan kepada wali murid lembaga menganjurkan untuk memberikan seikhlasnya. Dalam artian sesuai dengan kemampuan perekonomian mereka. Tetapi kebanyakan dari mereka memberikan sumbangan setiap bulan satu kali sebesar Rp. 15.000. Jika ada yang memberikan dibawahjumlah ini kami mentolerir hal itu. Dari jumlah lima belas ribu rupiah ini menjadi sumbangan dana operasional secara keseluruhan untuk kebutuhan keberlangsungan biaya pembelajaran.”⁸⁷

Semua pendapat yang disampaikan oleh sekian informan,

bahwasanya masyarakat dan wali murid tidak hanya memberikan

sumbangsih berupa finansial, wali murid dan masyarakat juga

⁸⁶ Alfadili, *wawancara*, Jember 17 juli 2019.

⁸⁷ Wahyu Aji Sasmito, *wawancara*, Jember 28 juni 2019.

bergotong-royong untuk melakukan bantuan pembangunan lembaga dan juga memberikan bantuan berupa alat-alat yang menunjang pembelajaran murid di sekolah. Kesadaran dan nilai simpati yang tinggi oleh wali murid membuat keberlangsungan pembelajaran lembaga di MTS SA Mifahul Ulum bisa dapat stabil.

Pendapat di atas selaras dengan bukti adanya alat drum band di bawah ini

4.3 gambar.
Alat Musik Drum Band⁸⁸



Data yang didapat dilapangan dari beberapa sumber yang penulis temukan, bahwasanya kesadaran akan pentingnya pendidikan diaplikasikan oleh seluruh elemen lembaga MTS SA Miftahul Ulum, baik ketua yayasan, jajaran pengurus lembaga, guru dan wali murid dengan keharmonisan yang tinggi untuk bersama-sama dalam memajukan lembaga ini. Dengan kesadaran ini mereka memiliki impian besar atas pengembangan kualitas dan mutu dari putera putrinya. Selain itu wali murid juga dibebaskan biaya SPP disetiap

⁸⁸ Dokumentasi, MTs SA Miftahul Ulum, Jember 28 Juni 2019.

bulannya, maka stabilitas lembaga ditentukan oleh efisiensi dan minimalisir anggaran yang diperoleh dari semua donatur yang setiap tahun ajaran baru akan dilakukan proses evaluasi dari hasil RKAM agar menjadi lebih baik kedepannya. Hal ini di buktikan dengan adanya “daftar pembayaran infaq bulanan yang diberikan ke madrasah.”⁸⁹

Dari berbagai sumber di atas dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat ikun berpartisipasi dalam melaksanakan pembiayaan pendidikan dalam bentuk uang ataupun barang.

3. Peran Serta Masyarakat dalam evaluasi Pembiayaan Pendidikan

Informasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program, karena dari masukan hasil evaluasi itulah para pengambil keputusan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau yang telah dilaksanakan.

Bapak Wahyu selaku kepala madrasah mengatakan:

“Evaluasi dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Dan yang melakukan evaluasi yaitu kepala madrasah beserta komite madrasah. Bentuk pelaporannya yaitu berupa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) madrasah yang dibuat oleh bendahara. Setelah bendahara menyusun LPJ maka bendahara akan memberikan LPJ kepada kepala madrasah. Kemudian karena madrasah ini dibawah lindungan yayasan maka kemudian kepala madrasah dan komite madrasah mengLPJkan ke yayasan.”⁹⁰

Bapak M. Muafi selaku komite madrasah mengatakan:

“Saya sebagai komite atau penghubung antara lembaga dan masyarakat bertugas menyampaikan surat undangan untuk

⁸⁹ Observasi, MTs SA Miftahul Ulum, Jember 28 Juni 2019.

⁹⁰ Wahyu Aji Sasmito, *wawancara*, Jember 28 juni 2019.

membahas atau mengevaluasi kinerja yang telah diagendakan dalam satu tahun sebelumnya, dalam forum ini kami memiliki tujuan untuk menyerap segala aspirasi yang diberikan oleh wali murid untuk kebaikan lembaga selanjutnya. Dari sekian banyak aspirasi yang dicatat dalam pertemuan ini selanjutnya akan dibawa pada forum RKAM yang dilakukan setiap tahun satu kali.”⁹¹

Hal yang sama di paparkan oleh bapak Alfadili selaku wali murid:

“Kami selaku wali murid atau masyarakat dalam forum itu menghadiri undangan dan mengikuti alur perforuman, kami tidak hanya diam, namun mengevaluasi juga kinerja yang telah dikerjakan oleh madrasah selama satu tahun dan kami juga menyampaikan ide atau pendapat untuk madrasah lebih baik kedepannya, forum evaluasi tahunan ini sangat membantu untuk memajukan lembaga kedepannya.”⁹²

Dari asumsi ini bisa dikatakan bahwasanya aspirasi dan gagasan untuk kebaikan lembaga kedepannya juga melibatkan masyarakat. Selaras dengan teori diatas (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) bahwa dalam mengoperasikan lembaga ini, selain ketua yayasan tahap controlling juga melibatkan wali murid untuk mengevaluasi keberlangsungan lembaga selama satu tahun. Berbeda dengan biaya pemasukan dan pengeluaran dari Madrasah yang hanya melaporkan hasilnya kepada kepala yayasan.

Hal ini diperkuat dengan adanya evaluasi yang dilaksanakan oleh madrasah sebagaimana gambar dibawah ini

⁹¹ Moh. Muafi, *wawancara*, Jember 09 Juli 2019.

⁹² Alfadili, *wawancara*, Jember 17 juli 2019.

4.4 gambar LPJ Sekolah dan Evaluasi⁹³



Seperti yang dikatakan oleh Bapak Wafir sebagai Bendahara Madrasah:

“Saya bertugas untuk menyusun, merangkap semua dana atau anggaran baik itu pemasukan atau pengeluaran dan semua kegiatan yang ter-agendakan selama satu priode untuk dibuat LPJ dan diserahkan kepada kepala madrasah. Setelah selesai semua maka ada forum evaluasi dengan seluruh pihak madrasah, kepala yayasan, wali murid dan masyarakat. Laporan yang saya buat harus akurat dan akuntabel, demi kepercayaan dan kredibilitas lembaga, maka setiap pemasukan dan pengeluaran harus dibuktikan dengan nota pembayaran.”⁹⁴

Segala upaya yang dilakukan oleh pengurus lembaga, menggambarkan sistem administrasi yang baik. Dengan adanya Laporan Pertanggung Jawaban yang sangat akurat menjadi landasan refrensi dalam menjalankan pembelajaran dilembaga ini.

⁹³ Dokumentasi, MTs SA Miftahul Ulum, Jember 17 Juli 2019.

⁹⁴ Mohammad Wafir, *wawancara*, Jember 01 Juli 2019.

C. Pembahasan Temuan

1. Perencanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan di MTs SA Miftahul Ulum

Berdasarkan hasil temuan di atas diketahui bahwa dalam tahap perencanaan pembiayaan anggaran di MTs SA Miftahul Ulum melakukan Rapat Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) yang dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat guna mengetahui kebutuhan pokok yang perlu mengeluarkan pembiayaan meliputi, sarana belajar, honorarium, dan segala kebutuhan pokok lainnya yang dilakukan dengan tahap analisis. Sesuai dengan teori perencanaan pembiayaan pendidikan mencakup penyusunan anggaran belanja yang terdiri dari sumber pendapatan, pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, bahan dan alat pengajaran, honorarium dan kesejahteraan. Pengertian tersebut mengandung unsur-unsur bahwa didalam perencanaan ada proses, ada kegiatan yang rasional dan sistematis serta adanya tujuan yang akan dicapai.⁹⁵

Dalam perencanaan anggaran kebutuhan lembaga MTS SA Miftahul Ulum menyusun segala biaya operasional selama satu tahun melalui musyawarah mufakat bersama beberapa elemen antara lain wali murid dan peran serta masyarakat dalam memutuskan. Sesuai dengan pendapat Cohen dan Upshoff bahwasanya dalam pengambilan keputusan, masyarakat menunjuk sepakat dari berbagai gagasan yang menyakut

⁹⁵ E. Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), 81.

kepentingan bersama.⁹⁶ Dalam hal ini masyarakat juga ikut serta dalam merencanakan rencana kegiatan anggaran madrasah (RKAM). Hal ini juga diperkuat dengan teori bahwa perencanaan dalam pembiayaan ialah kegiatan merencanakan sumberdana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan sekolah. Perencanaan pembiayaan sekolah disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang. Pengembangan jangka pendek berupa pengembangan satu tahunan. Pengembangan jangka panjang berupa pengembangan lima tahunan, sepuluh tahunan, bahkan dua puluh lima tahunan. Berdasarkan rencana pengembangan madrasah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, maka dibuatlah perencanaan pembiayaan sekolah.⁹⁷

Seluruh penjelasan diatas sesuai dengan teori perencanaan pembiayaan pendidikan dalam hal keuangan perlu dilakukan, hal ini disebut juga dengan penganggaran. Penganggaran (budgeting) merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget). Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga.⁹⁸

⁹⁶ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi ...*, 63.

⁹⁷ Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), 167.

⁹⁸ Nanang Fattah, *Ekonomi dan pembiayaan pendidika*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012) ,47.

2. Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan

Selain dana infak yang didapatkan dari dana BOS pemerintah yang kemudian diekspektasikan secara rasio oleh pengurus madrasah, pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan ini merupakan usaha kreatif yang diberikan oleh masyarakat atau wali murid untuk membantu proses pembiayaan pendidikan, baik berupa uang untuk memperbaiki gedung-gedung dan sarpras yang sudah rusak, beserta memberikan barang atau alat untuk siswa dalam belajar.

Sumbangan dana yang di berikan oleh masyarakat dipakai untuk keperluan lembaga berupa gaji guru, pemeliharaan gedung, biaya perobatan, buku-buku, bahan-bahan pelajaran dilaboratorium, alat peraga pendidikan dan alat tulis. Hal ini sesuai dengan teori pengeluaran pembiayaan pendidikan menurut Chon antara lain untuk gaji guru, pemeliharaan gedung, biaya perobatan, buku-buku, bahan-bahan pelajaran di laboratorium, alat peraga pendidikan dan alat tulis.⁹⁹

Masyarakat atau wali murid memberikan bantuan konkrit yang peneliti temukan dilapangan. Mereka menyumbang drumband kepada sekolah agar siswa dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dalam hal keterampilan seninya. Masyarakat juga memberikan sound sistem untuk inventaris lembaga, atau rebana untuk mengembangkan kualitas siswa dalam memainkan hadrah. Banyak bantuan usaha yang diberikan

⁹⁹ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 258.

oleh masyarakat kepada lembaga baik berupa dana infaq maupun alat belajar untuk siswa.

Hal ini sesuai dengan teori Dedi Supriadi biaya pendidikan adalah salah satu komponen instrumental (instrumental input) yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang, dan tenaga.¹⁰⁰

3. Evaluasi Peran Serta Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan

Sesuai data yang ditemukan di atas, proses evaluasi yang melibatkan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, masyarakat terlibat dalam forum musyawarah yang dilakukan setiap tahunnya. Forum ini berfungsi untuk melihat ekspektasi biaya masuk dan angka rasio pengeluarannya. Selaras dengan laporan yang diberikan oleh bendahara lembaga sebagai usaha transparansi anggaran, forum ini ditujukan untuk melibatkan masyarakat agar lebih menambah kepercayaan kepada lembaga berbasis dengan bukti transaksi.

Pengurus lembaga yang melaksanakan pembiayaan lembaga sesuai dengan dana yang masuk melalui dana infak, dana BOS dan bantuan masyarakat kemudian merencanakan pembiayaan pendidikan melalui RKAM selama satu tahun yang juga membawa point point usulan yang diberikan oleh wali murid pada saat evaluasi sertiap tahunnya.

¹⁰⁰ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 3.

Sehingga setiap tahun ajaran baru ada pembaruan perencanaan biaya pendidikan selaras dengan dana yang masuk dan ide yang diberikan oleh masyarakat untuk lembaga.

Hal ini sesuai dengan teori Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana bahwasannya Kegiatan dari pembiayaan adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Pengurusan ini meliputi dua hal yaitu pertama, pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama yakni menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang.¹⁰¹

Maka sangat signifikan peran dari masyarakat untuk mengevaluasi biaya pendidikan jika dilihat dari keseriusan dalam terlibat aktif untuk memajukan MTS SA Miftahul Ulum Panti Jember. Sebab mereka tidak hanya memberikan biaya infaq wajib, disisi lain mereka juga ikut memberikan bantuan diluar tanggung jawab primer kepada lembaga, maka hak mereka untuk mengevaluasi pengeluaran biaya pendidikan terealisasikan pada forum evaluasi setiap tahun dan terakomodir oleh pengurus madrasah dari semua masukan dan saran yang positif untuk lembaga ini. Dari forum inilah semua impian dan harapan wali murid terakomodasi dengan baik pada hasil RKAM untuk periode berikutnya, sehingga ikatan ketua yayasan, pengurus madrasah dan wali murid saling keterpaduan untuk kemajuan lembaga ini. Dalam hal ini sesuai dengan

¹⁰¹ Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2009), 318.

ungkapan Djuju Sudjana Evaluasi merupakan kegiatan yang bermaksud untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan¹⁰²

Saat evaluasi ada beberapa hal pokok yang dibahas oleh MTS SA Miftahul Ulum sebagaimana berikut: 1) Transparansi pengeluaran dari penanggung jawab kegiatan 2) Menyesuaikan jumlah pemasukan dan pengeluaran 3) Melakukan rekomendasi usulan baru dari kesalahan-kesalahan yang ditemukan. Tiga hal pokok ini akan menjadi acuan untuk perencanaan pembiayaan pendidikan di tahun berikutnya, begitu regulasi berjalannya keuangan disetiap tahun pada lembaga ini mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi peran masyarakat dalam merumuskan bantuan biaya pendidikan terhadap Madrasah Tsanawiyah SA Miftahul Ulum Panti Jember.

Sesuai dengan teori Sulthon dan Khusnuridlo pertanggungjawaban merupakan transparansi dalam mengelola keuangan. Model bentuk keuangan dapat berbeda-beda sesuai dengan sumber anggarannya. Pada prinsipnya pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan mengikuti aturan dari donatur atau sumber anggaran. Namun demikian prinsip transparansi dan kejujuran dalam pertanggungjawaban tersebut harus dijunjung tinggi.¹⁰³

¹⁰² Djuju Sudjana, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah Untuk Pendidikan Non Formal Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 7.

¹⁰³ Sulthon dan Khusnuridlo, *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Perspektif Global*, (Yogyakarta: Laksbang PREESindo, 2006), 267.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari proses penelitian dan pembahasan tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembiayaan pendidikan, dalam penyusunan anggaran kegiatan madrasah di MTs SA Miftahul Ulum merencanakan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan yang ada di lembaga ini, yang akan di laksanakan baik pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang. Pengembangan jangka pendek berupa pengembangan satu tahunan. Pengembangan jangka panjang berupa pengembangan lima tahunan, sepuluh tahunan, bahkan dua puluh lima tahunan. Dalam perencanaan berisi rancangan anggaran penerimaan dan pengeluaran yang di gunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan madrasah baik dalam jangka pendek atau jangka panjang.
2. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan, selain dana infak yang diberikan dan dana BOS dari pemerintah yang di ekspektasikan secara rasio oleh pengurus madrasah, pelaksanaan ini merupakan usaha kreatif yang diberikan oleh masyarakat atau wali murid untuk membantu proses pembiayaan pendidikan, baik berupa uang untuk memperbaiki gedung-gedung dan sarpras yang sudah rusak, beserta memberikan barang atau alat untuk siswa dalam belajar.

3. Pean serta masyarakat dalam evaluasi pembiayaan pendidikan, masyarakat terlibat dalam forum musyawarah yang dilakukan setiap tahunnya. Forum ini berfungsi untuk melihat ekspektasi biaya masuk dan angka rasio pengeluarannya. Selaras dengan laporan yang diberikan oleh bendahara lembaga sebagai usaha transparansi anggaran. forum ini ditujukan untuk melibatkan masyarakat agar lebih menambah kepercayaan kepada lembaga berbasis dengan bukti transaksi.

B. Saran

Sebagai penulis sekaligus peneliti dalam penyusunan skripsi ini, penulis ingin memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk saran - saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Madrasah

Ciptakan semangat untuk membangun MTs SA Miftahul Ulum Panti Jember lebih maju, meningkatkan kualitas pendidikan dengan menciptakan out put yang lebih baik, sehingga madrasah akan dipercaya oleh masyaraat dan pembiayaanspun akan meningkat.

2. Bagi Komite Madrasah

Semangat dalam melakukan kerja sama dan memberikan masukan-masukan untuk menggalang dana masyarakat.

3. Bagi Tim Pembiayaan

Membuat program yang unggul juga dalam implementasinya untuk meningkatkan mutu madrasah.

Peran serta masyarakat sejatinya tidak hanya terbatas pada pembiayaan pendidikan semata, namun peran masyarakat/partisipasi yang dibangun juga mencakup aspek pembelajaran. Karena keterbatasan waktu dan kesempatan, penelitian ini belum mampu untuk merambah aspek pembelajaran tersebut. Kepada pembaca yang memiliki ketertarikan dengan tema penelitian peran serta masyarakat dalam pendidikan, penulis merekomendasikan agar pembaca melakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam manajemen pembelajaran di MTs SA Miftahul Ulum.



DAFTAR PUSTAKA

- A. D. Siti Irene. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Arikunto, Suharsimi dan Yuliana, Lia. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media
- Azhari, Lisni, Ulpha & Kurniady, Achmad, Dedy. 2016. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, dan Mutu Sekolah*. Jurnal Administrasi Pendidikan Vol. XXIII No. 2
- Azra, Azyumardi. 2012. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Melenium II*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Budimansyah, Dasim. 2008. *Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat*. Jurnal Educationist 2 no.1
- Budirahayu, Tuti. *Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan: Kendala dan Peluang unuk Meraih Pendidikan yang Layak di Era Otonomi Daerah (Paper S-2)*
- Creswell, John W. 2010. *Research Design* .Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Effendi. 2002. *Analisa Persepsi Masyarakat terhadap Taman Nasional Gunung Lauser Desa Harapan Jaya Kabupaten Langat Sumatra Utara*. Sumatera: UNSU
- Fattah, Nanang. 2006. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Handoko, Hani. 2008. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Harsono. 2007. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta
- Irianto, Agus. 2013. *Pendidikan sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa*. Jakarta: Kencana
- Khusnuridlo dan Sulthon. 2006. *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Perspektif Global*. Yogyakarta: Laksbang PREESindo
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Mas, Roskina, Siti. 2011. *Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Malang
- Miles, B Matthew. dan Huberman, A. Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. terj. Tjetjep Rohendi Rohini. Jakarta: UI Pers
- Mof, Yahya, Dkk. 2013. *Manajemen Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Pada Mts Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin*. Jurnal Tashwir Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Iain Antasari 1, No.2, Juli-Desember
- Moleong, J Lexy. 2009. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Mulyana, Deddy. 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyasa, E. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mulyasa, E. 2005. *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Nata, Abuddin. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standart Pembiayaan Pendidikan Nonpersonalia. Jakarta: Depdiknas
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
- Pidarta, Made. 2009. *Perencanaan Pendidikan Partisipasi dengan Pendekatan System*. Jakarta: Rineka Cipta
- Priansa, Juni, Donni & Somad, Rismi. 2014. *Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bandung: Alfabeta
- Sagala, Syaiful. 2007. *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta
- Satori, Djam'an & Komariah, Aan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Shadily dan Echols. 2000. *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia. Dictionary*. Jakarta : PT. Gramedia

- Sudjana, Djuju. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah Untuk Pendidikan Non Formal Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyorini. 2006. *Manajemen Pendidikan Islam*. Surabaya: Eikaf
- Supriadi, Dedi. 2004, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 2008. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Tim Penyusun. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Tim Penyusun. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press
- Ulfatin, Nurul. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan. 2006. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI. Jakarta
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Yulianti. 2012. *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan*. Padang: Universitas Andalas
- Yunanda. 2009. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Balai Pustaka
- Zubaedi. 2009. *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yayuk Lestari

Nim : 084143110

Prodi/Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam/Kependidikan Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul "Peran Serta Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap "SA" Miftahul Ulum Panti Jember Tahun Pelajaran 2018/2019 adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 10 Januari 2020

Saya yang menyatakan



Yayuk Lestari
NIM 084143110

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

A. Observasi

1. Mengamati Kondisi objek penelitian
2. Mengamati Sarana dan prasarana penunjang pendidikan
3. Mengamati proses berlangsungnya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang mengikutsertakan masyarakat

B. Wawancara

1. Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di MTs SA Miftahul UlumPantiJember
2. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTs SA Miftahul Ulum Panti Jember
3. Peran serta masyarakat dalam evaluasi pembiayaan pendidikan di MTs SA Miftahul Ulum Panti Jember

C. Dokumentasi

1. Profil lembaga MTs SA Miftahul Ulum Pati Jember.
2. Mendapatkan data-data perihal pembiayaan Pendidikan
3. Dokumen lain yang relevan dari berbagai sumber yang diakui validitasnya dalam memperkuat analisis objek pembahasan.



YAYASAN MIFTAHUL ULUM
MTs SA MIFTAHUL ULUM

Jl. KH. Achmad Yasin No. 02 Dusun Sodong Desa Kemiri Panti Jember 68153

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 014/02/SK.SP/VIII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Aji Sasmito
Jabatan : Kepala MTs SA Miftahul Ulum

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Yayuk Lestari
NIM : 084143110
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian di MTs SA Miftahul Ulum mulai tanggal 28 Juni 2019 s.d. 9 Agustus 2019, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Peran Serta Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan di MTs SA Miftahul Ulum*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Panti, 9 Agustus 2019

Kepala Madrasah



WAHYU AJI SASMITO, S.P.

DOKUMENTASI



Foto bersama Bapak Kepala MTs SA Miftahul Ulum Pantj Jember



Foto bersama Bapak Komite MTs SA Miftahul Ulum Pantj Jember



Foto bersama Bapak Bendahara MTs SA Miftahul Ulum Pantj Jember



Foto bersama Bapak Tokoh Masyarakat



Rapat Sekolah bersama Masyarakat



Rapat Guru



Kerja Bakti dalam Pembangunan Sekolah



Peralatan Musik Sekolah

KELAS VII

Nama	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Ket.
Imad Abdul Habi	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Lunas
Iin Hidayat	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Lunas
Iin Maulana	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Lunas
Ii Hasan	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Lunas
endi Analiyamb	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Lunas
isael Arifin	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Lunas
izatul Mukarrotah	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Lunas
irdi	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Lunas
eri Irawah	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Lunas
imal Fiki	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Lunas
an Nur Azizah	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Lunas
idius Sa'adah	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Lunas
Fauzan <	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Lunas
ilan	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Lunas
lech, Zainuddin	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Lunas
loh, Lutfi	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Lunas
urul Imamah	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Lunas
uti Nur Azizah	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Lunas
ulu Windi Leresati	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Lunas
ih Ariska	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Lunas
iske Anggraini Putri	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Lunas
Riattul Fitria	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Lunas
inda	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Lunas
era Wulandari	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Rp.15000	Lunas

Nama	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Ket.
Zewi Shinta	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Lunas
Yini	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Lunas
vna Maria Novita	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Lunas
Salqis Yuliana Zahra	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Lunas
Salvatus Solehah	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Lunas
Tridatul Hasanah	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Lunas
feri Matus Sholeha	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Lunas
Isriyah	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Lunas
Amawati	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Lunas
Chomsatul Hasanah	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Lunas
A. Rico Antonio Saifullah	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Lunas
A. Rifaldi	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Lunas
Auliana Rifaldi	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Lunas
Ajla Kartika Sari	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Lunas
Alta Puspita Sari	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Lunas
Ahhammad Rifandi	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Lunas
Autiara Anisatul Humairo	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Lunas
Laehan	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Lunas
Safnatul Fitriyah	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Lunas
Siti Munawaroh	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Lunas
Sodikin	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Lunas
Solihin	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Lunas
Tini Widjawati	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Lunas
Shofia	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Lunas
Jeviatul Aliati	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Rp. 15000	Lunas

BIODATA PENULIS



Nama : Yayuk Lestari
Tempat tanggal lahir : Jember, 27 Oktober 1996
Alamat : Bangsalsari, Jember
Prodi/jurusan : MPI/Kependidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Email : ayrhie03@gmail.com
Riwayat pendidikan : 1. SDN Curah Kalong 01 Jember
3. MTs N Bangsalsari Jember
4. MA Darussholah Jember
5. IAIN Jember